BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Pemerintah Kabupaten Gresik

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK

2025

Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik
Jl. KH Wachid Hasyim No.5

Visit Us
dprd.gresikkab.go.id

Email
sekretariat.dprdgresik@gmail.com

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2025.

Materi Laporan antara lain menguraikan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang diselenggarakan serta sasaran yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik, juga dimuat inventarisasi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif penyelesaian masalah berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 berarti Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik telah menyelesaikan kegiatannya dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2025 – 2029 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam upaya mencapai tujuan dan sasarannya. Selama tahun 2025, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik untuk tahun 2025 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025. Sebagai bentuk implementasi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders* kami.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.

Gresik, 27 Februari 2026
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN GRESIK

Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik selama Tahun 2025 yang merupakan amanah yang diemban oleh organisasi. Selain itu LKjIP juga merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Melalui LKjIP, Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029, yang tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029, yang merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi selama tahun 2025 – 2029.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan dalam 1 (satu) sasaran, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran, dengan didukung 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 68 (enam puluh delapan) sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan sangat baik dengan capaian indikator kinerja sebesar 103 % dari target sasaran yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini berarti kinerja Sekretariat DPRD di tahun 2025 dapat dicapai dengan kategori **Sangat Memuaskan**.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 100.067.769.956,77 dan telah direalisasi sebesar Rp. 83.193.711.379,63 atau 83,14 %.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik selama Tahun 2025 yang merupakan amanah yang diemban oleh organisasi. Selain itu LKjIP juga merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Melalui LKjIP, Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029, yang tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029, yang merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi selama tahun 2025 – 2029.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan dalam 1 (satu) sasaran, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran, dengan didukung 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 68 (enam puluh delapan) sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan sangat baik dengan capaian indikator kinerja sebesar 103 % dari target sasaran yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini berarti kinerja Sekretariat DPRD di tahun 2025 dapat dicapai dengan kategori **Sangat Memuaskan**.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 100.067.769.956,77 dan telah direalisasi sebesar Rp. 83.193.711.379,63 atau 83,14 %.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Ringkasan Eksekutif iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 3
1.3 Pola Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD 4
1.4 Gambaran Umum Organisasi 5
1.5 Sistematika Penyusunan 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA 15

2.1 Rencana Strategis 16
2.2 Indikator Kinerja Utama 17
2.3 Perjanjian Kinerja 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 25
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 33
3.3 Akuntabilitas Keuangan 36
3.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi 49

BAB IV PENUTUP 41

LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Rencana Strategis (RS) 2025-2029
Lampiran 2. Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja 2025
Lampiran 4. Formulir Pengukuran Kinerja 2025
Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran 2025
Lampiran 6. Cascading Sekretariat DPRD
Lampiran 7. Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP 2024
Lampiran 8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP 2024

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik	8
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik	10
Gambar 1.2	Grafik Jumlah PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik	11
Tabel 1.2	Proyeksi Kondisi dan Kebutuhan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Berdasarkan Peta Jabatan	11
Tabel 1.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik	12
Tabel 1.4	Jumlah Aset Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik	13
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran Beserta Indikator Sasaran	17
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama	18
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Program	23
Tabel 3.1	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja	26
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja	27
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Per Kegiatan dan Sub Kegiatan	27
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra	31
Gambar 3.1	Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja	32
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional	32
Tabel 3.6	Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan	34
Tabel 3.7	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran	35
Tabel 3.8	Realisasi Belanja	36
Tabel 3.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	38
Tabel 3.10	Implementasi Sasaran Dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostime, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada *input*, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik *output* maupun *outcome*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis

kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Wujud akuntabiltas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan teknis penyusunannya diterapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diperbaiki dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan. Keputusan Kepala LAN tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan. Laporan Kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (*Good Governance*) serta pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas bidang urusan Sekretariat DPRD.

Agar dalam pelaksanaan bidang urusan Sekretarait DPRD sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik. Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan *(Strenght)* dan mengatasi kelemahan *(Weakness)* dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang *(Opportunity)* dan dapat mengatasi ancaman *(Threat)* yang mungkin terjadi. Dengan demikian Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi di bidang urusan wajib Sekretariat DPRD mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban

pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025.

Adapun tujuannya adalah:

a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2025;

b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik pada Tahun 2025, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik di masa yang akan datang;

c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3 Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD

Sebagai media pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik sesuai amanat dalam Program Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik maka ruang lingkup penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun di batasi ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. ***Tahap Pengumpulan Data***, mengumpulkan Data Kinerja sesuai bidang urusan wajib Sekretariat DPRD;
2. ***Tahap Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja***, inventarisasi sasaran dengan indikator kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra), selanjutnya disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 sebagai bentuk Komitmen Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Komitmen Kinerja sebagai dasar pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025;

3. ***Tahap Pengukuran Capaian Kinerja***, perencanaan kinerja yang tertuang dalam Pernyataan Kinerja berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja. Dalam pengukuran capaian kinerja sesuai dengan target yang direncanakan selanjutnya membandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2025.
4. ***Akuntabilitas Kinerja,*** dengan didukung data – data kinerja yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, selanjutnya dilakukan analisa yang merupakan isi pokok dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik serta hasil analisa ini dijadikan dasar dan pertimbangan dalam pelaksanaan kinerja tahun mendatang.

Laporan Kinerja merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi yang diketahui dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan laporan capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029.

1.4 Gambaran Umum Organisasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk:

"Menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya".

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan DPRD;
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
d. fasilitasi pengganggaran, pengawasan, kerjasama dan Aspirasi; dan
e. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang mana secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur kelembagaan atau organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik, terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bagian Program dan Keuangan
   a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
   a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi
   a. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kelompok Jabatan Fungsional / Tenaga Ahli

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025

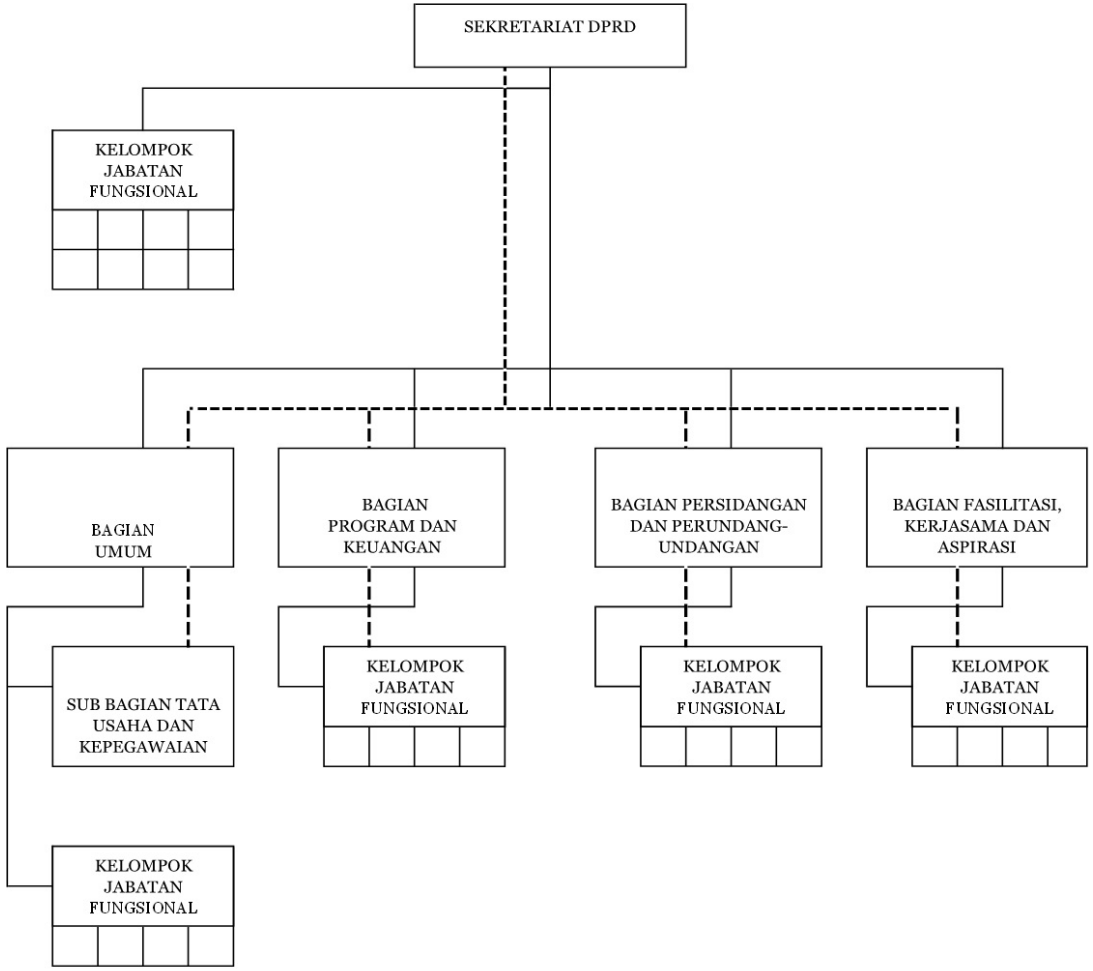

Sebagaimana gambaran struktur organisasi *(Organization Chart)* Satuan Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik di atas, bahwa unsur pimpinan membawahi ;

1. **Bagian Umum** yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga kesekretariatan DPRD dan keanggotaan DPRD.
2. **Bagian Program dan Keuangan** yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian dalam mendukung DPRD di bidang pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perbendaharaan, verifikasi dan laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan.
3. **Bagian Persidangan dan Perundang-undangan** yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian pelayanan dukungan DPRD dalam pelaksanaan persidangan dan perundang-undangan.
4. **Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi** yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi fungsi penganggaran dan pengawasan serta Kerjasama dan Aspirasi DPRD.
5. **Kelompok Jabatan Fungsional / Tenaga Ahli**, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Secara operasional, Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik didukung sumber daya manusia sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Secara rinci data aparatur/pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik berdasarkan pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik

Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Pendidikan						Jml
	Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (I/a)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (I/c)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I (I/d)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	5	-	-	-	5
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur (II/c)	-	-	1	2	-	-	3
	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	2	-	-	-	2
3.	Penata Muda (III/a)	-	-	-	-	16	-	16
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-	-	-	-	10	-	10
	Penata (III/c)	-	-	-	-	-	-	-
	Penata Tingkat I (III/d)	-	-	-	-	5	2	7
4.	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	2	-	2
	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**-**	**-**	**8**	**2**	**33**	**4**	**47**

Dalam bentuk grafik, jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik berdasarkan pendidikan dan golongan dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1.2 Grafik Jumlah ASN Sekretariat DPRD Kab. Gresik Tahun 2025

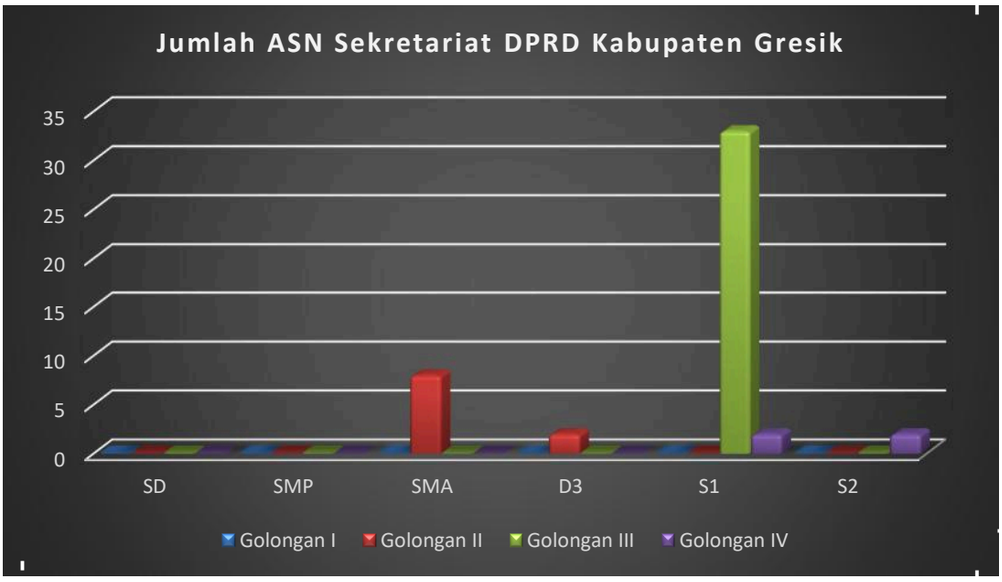

Bila ditinjau dari jumlah pegawai yang ada memang kurang ideal tetapi dengan kemampuan yang ada Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik senantiasa berupaya memaksimalkan peranan pegawai sesuai tugas dan fungsi yang ada. Hal ini dapat dilihat pada table peta jabatan berikut ini :

Tabel 1.2

Proyeksi Kondisi dan Kebutuhan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Berdasarkan Peta Jabatan Per 31 Desember 2025

No	Nama Jabatan	Kelas	Pemangku	Kebutuhan	Lebih/ Kurang
1	**SEKRETARIS DPRD**	14	1	1	0
2	**KEPALA BAGIAN UMUM**	12	1	1	0
3	**KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN**	9	1	1	0
4	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
5	Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0
6	Analis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
7	Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	1	-1
8	Arsiparis Ahli Pertama	8	0	1	-1
9	Penata Laksana Barang Terampil	7	1	1	0
10	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
11	Penatakelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	1	1	0
12	Penata Layanan Operasional	7	7	7	0

No	Nama Jabatan	Kelas	Pemangku	Kebutuhan	Lebih/ Kurang
13	Pegadministrasi Perkantoran	5	1	1	0
14	Operator Layanan Operasional	5	20	20	0
15	Pengelola Umum Operasional	3	1	1	0
16	**KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**	12	1	1	0
17	Perencana Ahli Muda	10	1	1	0
18	Analis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
19	Perencana Ahli Pertama	8	1	2	-1
20	Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	1	-1
21	Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	3	0
22	Penata Layanan Operasional	7	3	7	-1
23	Pegadministrasi Perkantoran	5	4	4	0
24	**KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**	12	1	1	0
25	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10	1	1	0
26	Analis Kebijakan Ahli Muda	10	1	1	0
27	Pranata Humas Ahli Muda	9	1	1	0
28	Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	1	3	-2
29	Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	4	0
30	Penatakelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	1	1	0
31	Penata Layanan Operasional	7	8	8	0
32	Pengelola Keprotokolan	6	1	1	0
33	Pegadministrasi Perkantoran	5	2	2	0
34	Operator Layanan Operasional	5	1	1	0
35	**KABAG FASILITASI, KERJASAMA, DAN ASPIRASI**	12	0	1	-1
36	Analis Kebijakan Ahli Muda	10	2	2	0
37	Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	1	-1
38	Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	2	0
39	Pengolah Data dan Informasi	6	1	1	0
40	Pegadministrasi Perkantoran	5	2	2	0
41	Operator Layanan Operasional	5	3	3	0

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi pegawai ASN berdasarkan peta jabatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Namun

kondisi ini belum mampu mendorong percepatan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hal ini disebabkan karena penyusunan peta jabatan tidak didasarkan pada anilisis data kinerja yang sesuai dengan pohon kinerja dan tanpa koordinasi antar *stake holder* yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.

Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

No.	Sarana dan Prasarana Yang Digunakan	Jumlah
1.	Ruang Kerja	28
2.	Meja/Kursi Kerja	316
3.	Komputer	79
4.	Kendaraan Operasional Roda 4	18
5.	Kendaraan Operasional Roda 2	7

Tabel 1.4
Jumlah Aset Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Per 31 Desember 2025

No	Kode Kelompok Barang	Uraian	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi
1	10111	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG	1	2.362.500.000,00	BAIK
2	20203	ALAT - ALAT BANTU	5	526.570.000,00	BAIK
3	20301	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	26	7.906.121.535,00	BAIK
4	20601	ALAT KANTOR	44	1.114.094.389,20	BAIK
5	20602	ALAT RUMAH TANGGA	832	5.347.266.718,32	BAIK
6	20603	KOMPUTER	339	1.921.409.226,30	BAIK
7	20604	MEJA & KURSI KERJA / RAPAT PEJABAT	43	138.546.135,33	BAIK
8	20701	ALAT STUDIO	349	4.499.248.970,10	BAIK

No	Kode Kelompok Barang	Uraian	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi
9	20702	ALAT KOMUNIKASI	22	1.293.330.950,00	BAIK
10	31101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	9.716.212.117,01	BAIK
11	31102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	-	BAIK
12	41505	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	1	199.588.900,00	BAIK
13	41509	INSTALASI PENGAMANAN	1	10.750.000,00	BAIK
14	51701	BUKU	299	99.657.975,00	BAIK
15	5180	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	4	10.456.600,00	BAIK
16	802	ASET TAK BERWUJUD	7	62.305.621,00	BAIK
TOTAL			**1.975**	**382.759.096,00**	

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Rencana Strategis (RS) 2025-2029
Lampiran 2. Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja 2025
Lampiran 4. Formulir Pengukuran Kinerja 2025
Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran 2025
Lampiran 6. Cascading Sekretariat DPRD
Lampiran 7. Laporan Hasil Implementasi SAKIP 2024
Lampiran 8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP 2024

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Tujuan organisasi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan proses yang berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

a. Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan organisasi harus dapat menunjukkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktifitas pelaksanaan misi Kepala Daerah. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana. Dengan berlandaskan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan didalam RPJMD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik untuk Tahun 2025 – 2029 menetapkan tujuan yaitu ***"Terwujudnya Sinergitas Antara Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"***.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya secara terukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik tahun 2025 – 2029 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran Beserta Indikator Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya Sinergitas Antara Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan atas dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1. Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan 2. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD 3. Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD 4. Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Gresik Nomor: 067/532/HK/437.12/2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik Dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan atas dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1. Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan	100%
		2. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD	100%
		3. Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD	100%
		4. Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	96,25 Nilai

Untuk dapat mewujudkan Indikator Kinerja Utama maka diperlukan formulasi penghitungan pada setiap indikator yaitu:

1. Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan dengan formulasi :
   Jumlah layanan administrasi kesekretriatan dan keuangan DPRD yang dipenuhi dibagi jumlah layanan administrasi kesekretriatan dan keuangan DPRD berdasarkan Renja dikali 100%
2. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD dengan formulasi :
   Jumlah pelaksanaan fungsi DPRD yang difasilitasi dibagi jumlah pelaksanaan fungsi DPRD berdasarkan Rencana Kerja DPRD dikali 100%.
3. Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD dengan formulasi : Jumlah pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi dibagi jumlah pelaksanaan tugas DPRD berdasarkan Rencana Kerja DPRD dikali 100%.
4. Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dengan formulasi :
   Nilai hasil survey kepuasan Anggota DPRD atas kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) menggunakan aplikasi SUKMA Jatim.

2.3 Perjanjian Kinerja

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut.

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan Perangkat Daerah;
e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Gresik dan Sekretaris DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Gresik
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI
Jabatan : Bupati Gresik
selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
BUPATI GRESIK	SEKRETARIS DPRD
ttd	ttd
FANDI AKHMAD YANI	**Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.**
	Pembina Utama Muda
	NIP. 196804121992031011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN GRESIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan atas dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1. Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan 2. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD 3. Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD 4. Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	100% 100% 100% 96.25 Nilai

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 49.805.462.323,77	PAPBD
2	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 50.262307.633,00	PAPBD
JUMLAH			**Rp. 100.067.769.956,77**	**PAPBD**

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

ttd

FANDI AKHMAD YANI

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DPRD

ttd

Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP: 196804121992031011

Untuk merealisasikan Perjanjian Kinerja diatas maka Sekretaris DPRD Kabupten Gresik menetapkan Indikator Kinerja Program guna pencapaian sasaran organisasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3

INDIKATOR KINERJA PROGRAM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Formulasi	Target	Anggaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan atas dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan	Jumlah layanan administrasi kesekretariatan yang diselenggarakan dibagi jumlah layanan administrasi kesekretariatan dikali 100%	100%	49.805.462.323,77
			Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah layanan administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang diselenggarakan dibagi jumlah layanan administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dikali 100%	100%	
			Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sakip dari Inspektorat Kabupaten	86,55 Nilai	

		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.	Ketepatan Penetapan Ranperda Tahun N	Jumlah fasilitasi pembahasan Ranperda Tahun N yang tepat waktu dibagi jumlah pembahasan Ranperda Tahun N berdasarkan Renja DPRD dikali 100%	100%	50.262307.633,00
			Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Jumlah fasilitasi pembahasan Perda APBD Tahun N yang tepat waktu dibagi jumlah pembahasan Perda APBD Tahun N berdasarkan Renja DPRD dikali 100%	100%	
			Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah fasilitasi kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibagi jumlah kegiatan pengawasan berdasarkan Renja DPRD dikali 100%	100%	
			Persentase Dukungan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi dibagi jumlah pelaksanaan tugas DPRD Berdasarkan Renja DPRD dikali 100%	100%	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik pada tahun 2025 telah berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik. Capaian indikator kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada tahun 2025 diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%).

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya kualitas pelayanan atas dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan atas dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD” dengan 4 indikator yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan atas dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1. Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan	%	100	95	95%
	2. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD	%	100	94	94%
	3. Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD	%	100	98	98%
	4. Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	96,25	99,00	103%

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	REALISASI 2025	TINGKAT PERBANDINGAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan atas dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1. Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan	92%	95%	3.15%
		2. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD	80%	94%	14.89%
		3. Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD	93%	98%	5.10%
		4. Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	96,25 Nilai	99 Nilai	103%

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Per Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No.	Program	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Perbandingan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	0%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	0%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	0%

3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	0%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99%	102%	4%
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	86%	108%	28%
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100%	0%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	0%
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	111%	100%	-11%
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	100%	0%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	124%	126%	28%
9	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	106%	118%	28%
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91%	100%	9%
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	175%	160%	51%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	153%	130%	12%
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	0%
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	0%
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	109%	100%	-9%
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	0%
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	140%	100%	-40%
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	423%	366%	250%
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150%	73%	-132%
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	100%	0%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	267%	9950%	9947%
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	267%	9950%	9947%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98%	97%	-4%
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	0%
22	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	0%

23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95%	92%	-11%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91%	100%	9%
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67%	100%	33%
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18%	100%	82%
26	Pemeliharaan Mebel	100%	100%	0%
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	0%
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	0%
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	160%	100%	-60%
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	83%	81%	-23%
30	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	100%	100%	0%
31	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100%	100%	0%
32	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	50%	42%	-77%
	Layanan Administrasi DPRD	75%	130%	72%
33	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	60%	160%	123%
34	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	90%	100%	10%
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	83%	74%	-38%
35	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	100%	100%	0%
36	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100%	100%	0%
37	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	0%	100%	100%
38	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	100%	100%	0%
39	Penyusunan Tata Tertib DPRD	100%	0%	0%
40	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	100%	46%	-171%

	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	158%	58%
41	Pembahasan KUA dan PPAS	100%	158%	95%
42	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100%	200%	150%
43	Pembahasan APBD	100%	175%	118%
44	Pembahasan APBD Perubahan	100%	100%	0%
45	Pembahasan Laporan Semester	100%	150%	83%
46	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	0%
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	225%	181%
47	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	252%	114%	-107%
48	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	317%	100%	-217%
49	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	383%	100%	-283%
50	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	375%	100%	-275%
51	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	392%	100%	-292%
52	Pengawasan Penggunaan Anggaran	100%	200%	150%
53	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	100%	100%	0%
	Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	100%	0%
54	Orientasi DPRD	96%	96%	-4%
55	Pendalaman Tugas DPRD	100%	100%	0%
56	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	100%	100%	0%
57	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	67%	67%	-33%
58	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	100%	100%	0%
59	Penyusunan Program Kerja DPRD	108%	108%	8%
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	99%	99%	-1%
60	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	59%	100%	42%
61	Pelaksanaan Reses	50%	100%	50%
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	67%	100%	33%

62	Pengawasan Kode Etik DPRD	50%	400%	388%
	Fasilitasi Tugas DPRD	50%	400%	388%
63	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	98%	98%	-3%
64	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	55%	67%	-15%
65	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	100%	86%	-30%
66	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	54%	138%	99%

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI S/D 2025	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan atas dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1. Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan	100%	95%	95%
		2. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD	100%	94%	94%
		3. Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD	100%	98%	98%
		4. Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	97 Nilai	99 Nilai	103%

Rerata realisasi kinerja pada Tahun 2025 sebagai tahun pertama Renstra 2025–2029 mencapai 97,5% terhadap target tahunan. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahap awal perencanaan strategis. Meskipun demikian, tingkat capaian periode Renstra secara keseluruhan belum dapat dihitung secara kumulatif karena

masih berada pada tahun pertama pelaksanaan. Evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk menjaga konsistensi capaian pada tahun berikutnya.

Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja

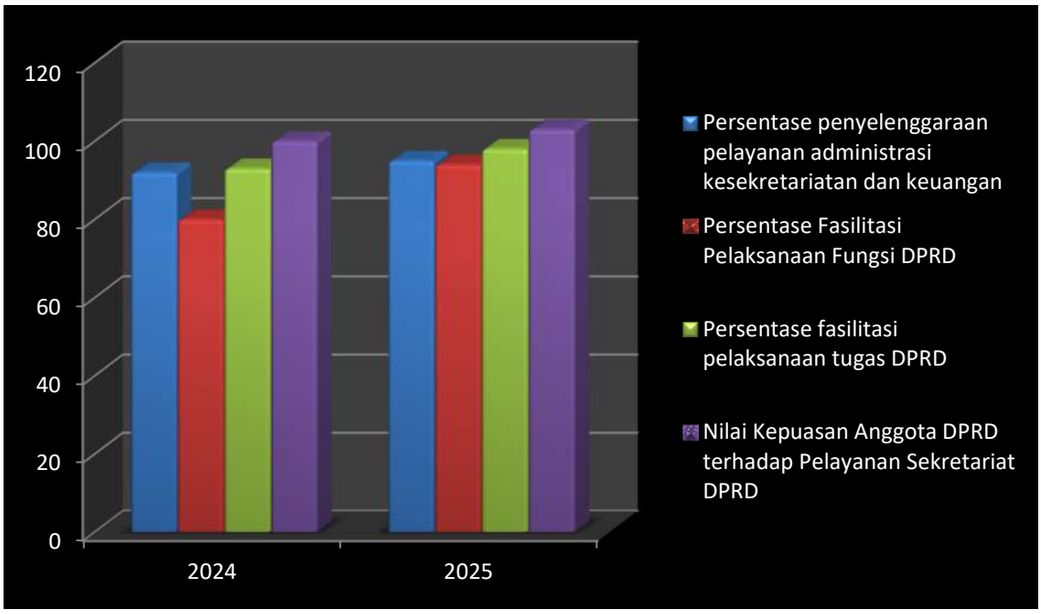

Tabel 3.5

Perbandinga Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Indikator	Realisasi	Standar Nasional	Tingkat Kesesuaian	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat	99	≥ 76,61	110%	Memenuhi
Ketepatan Penetapan Ranperda	94%	100%	94%	Mendekati
Ketepatan Penetapan Perda APBD	105%	100%	105%	Memenuhi
Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	98%	100%	98%	Mendekati
Nilai SAKIP	86,85	≥ 60	≥ 110%	Melampaui

Realisasi kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 secara umum telah memenuhi standar nasional sebagaimana pedoman dari Kementerian Dalam Negeri. Persentase kualitas pelayanan atas dukungan fasilitasi pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD dengan target 100% dan realisasi 103% yang berarti capaiannya adalah 103%. Nilai ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi sebanyak 743 kegiatan dibagi jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD berdasarkan Rencana Kerja DPRD sebanyak 722 kegiatan dikali 100%.

$$\frac{743}{722}\ x\ 100\% = 103\%$$

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selanjutnya evaluasi dan analisis kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bagian maupun Sub Bagian sebagai pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing sub pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis Sekretariat DPRD adalah :

1. Tersedianya anggaran operasional yang cukup;
2. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD, DPRD dan Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik untuk saling mendukung terlaksananya program dan kegiatan.

Sedangkan hambatan dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis adalah :

1. Terjadinya perubahan regulasi yang mendasar di tingkat pusat
2. Kurang optimalnya perencanaan kegiatan
3. Kurangnya pemahaman SDM terhadap tugas dan fungsi
4. Kurangnya *political will* dalam pelaksanaan tugas
5. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas

Strategi / upaya pemecahan permasalahan pencapaian sasaran-sasaran strategis adalah :

1. Melakukan penyesuaian (*refocusing)* anggaran sesuai kebutuhan prioritas.
2. Berkoordinasi secara intensif dengan Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD agar memperhatikan / konsisten terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
3. Melaksanakan kegiatan yang bersifat insidentil tersebut secara maksimal, dan untuk perencanaan di tahun berikutnya bisa diakomodir sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD terbentuk sistem informasi dan manajemen yang baik.
4. Pemahaman dan komitmen yang baik tentang Struktur Organisasi yang ada dan mengoptimalkan kinerja sesuai tugas dan fungsi, namun apabila ditengah jalan masih terdapat fungsi-fungsi yang belum ada pada Struktur Organisasi, maka diupayakan untuk melakukan reviu kepada pengambil kebijakan.

Tabel 3.6

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
1	Meningkatnya kualitas pelayanan atas dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan	Kurangnya pemahaman SDM terhadap tugas dan fungsi	Peningkatan kapasitas SDM
		Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD	Adanya perubahan regulasi di tingkat pusat	Refocusing anggaran sesuai kebutuhan
		Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas	Perubahan jadwal kegiatan DPRD	Rapat koordinasi mingguan

		DPRD		dengan pimpinan DPRD
		Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Koordinasi dan dukungan anggaran yang optimal	Peningkatan kualitas pelayanan

Tidak tercapainya target indikator disebabkan oleh perubahan agenda kegiatan DPRD yang berdampak pada penyesuaian jadwal kegiatan. Selain itu, keterbatasan SDM turut mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan.

Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya guna menilai sejauh mana sumber daya (anggaran) digunakan secara optimal untuk menghasilkan output dan outcome sesuai target kinerja, maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi secara berkelanjutan.

Tabel 3.7

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran	Caspaian Kinerja	Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan atas dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1. Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan	95.08%	95%	100%
		2. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD	71.36%	94%	132%
		3. Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD	88.64%	98%	110%
		4. Nilai Kepuasan Anggota DPRD	63.78%	103%	161%

		terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD			

Berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja, diperoleh tingkat efisiensi sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, dimana target kinerja hampir tercapai secara optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran. yang ditampilkan dalam prosentase realisasi. Pada Tahun 2025. anggaran belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik sebesar Rp. 100,067,769,956.77 yang telah direalisasi sebesar Rp. 83,193,711,380.66 atau 83.14%. sehingga terdapat silpa sebesar Rp. 16,874,058,577.14.00.

Tabel 3.8

Realisasi Belanja Tahun 2025

NO	URAIAN BELANJA	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
1	Sekretariat DPRD	100,067,769,956.77	83,193,711,380.66	83.14
TOTAL		**100,067,769,956.77**	**83,193,711,380.66**	**83.14**

Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan atas dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.	1. Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan	100%	95%	95	49,805,462,323.77	47,355,203,698.63	95.08	4.02
		2. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD	100%	94%	94	36,610,092,253.00	26,125,932,942.00	71.36	28.64
		3. Persentase	100%	98%	98	4,042,248,800.00	3,583,015,893.00	88.64	11.36

		fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD 4. Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	96.50 Nilai	99 Nilai	103	9,609,966,580.00	6,129,558,846.00	63.78	36.22
	Jumlah					**100,067,769,956.77**	**83,193,711,380.63**	**83.14**	**16.86**

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam pencapaian kinerja sasaran organisasi sebesar 16.86%.

Tabel 3.10

Implementasi Sasaran Dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan atas dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
						3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
						4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
						5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
					3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
						2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
						3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
					4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
						4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						5. Penyediaan Barang Cetakan dan

						Penggandaan
						6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
						7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
					5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel
						2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						2. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
						3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

					7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						3. Pemeliharaan Mebel
						4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
						6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					8. Layanan Keuangan dan	1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

					Kesejahteraan DPRD	2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
						3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
					9. Layanan Administrasi DPRD	1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
						2. Fasilitasi Fraksi DPRD
						3. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
				2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
						2. Pembahasan Rancangan Perda
						3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
						4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

						5. Penyusunan Tata Tertib DPRD
						6. Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
					2. Peningkatan Kapasitas DPRD	1. Pendalaman Tugas DPRD
						2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
						3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
						4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
						5. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
						6. Penyusunan Program Kerja DPRD
					3. Fasilitasi Tugas DPRD	1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
						2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
						3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan

						Musyawarah
						4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
					4. Pembahasan Kebijakan Anggaran	1. Pembahasan KUA dan PPAS
						2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
						3. Pembahasan APBD
						4. Pembahasan APBD Perubahan
						5. Pembahasan Laporan Semester
						6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
					5. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum
						2. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur
						3. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang

						Kesejahteraan Rakyat
						4. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian
						5. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Sumber Daya Alam
						6. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan
						7. Pengawasan Penggunaan Anggaran
						8. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
					6. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
						2. Pelaksanaan Reses
						3. Pengawasan Kode Etik DPRD

Dari tabel diatas dapat dilihat Implementasi sasaran Tahun 2025 dilakukan melalui 2 Program dan 15 Kegiatan yang dijabarkan dalam 68 Sub Kegiatan yaitu fasilitasi pembentukan Perda, anggaran, pengawasan, serta administrasi kesekretariatan DPRD. Seluruh kegiatan diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai standar nasional dan mendukung peningkatan nilai SAKIP perangkat daerah.

3.4 Tindak Lanjut Hasli Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2024-2025 oleh Inspektorat Kabupaten Gresik, masih terdapat beberapa catatan perbaikan terkait penyelarasan indikator kinerja, kualitas perencanaan, serta konsistensi pelaporan kinerja. Dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Surat dari Inspektorat Nomor : X.700.04/2302/437.72/2025 tanggal 14 Oktober 2025 sebagaimana berikut :

1. Agar melampirkan DPA Tahun 2025 dan DPPA Tahun 2025.
   - Telah dilakukan pembenahan dokumen perencanaan dengan melampirkan DPA Tahun 2025 dan DPPA Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja..
   - Link : DPA APBD 2025 dan DPPA PAPBD 2025
2. Agar melampirkan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 yang telah diformalkan
   - Sekretariat DPRD telah menyusun dan menetapkan Dokumen Renstra 2025–2029 melalui proses formal sesuai ketentuan yang berlaku dan telah dilaporkan kepada Bappeda Kabupaten Gresik.
   - Link : Renstra 2025-2029
3. Agar mengusulkan kepada Bappeda Kabupaten Gresik untuk merubah Indikator Kinerja Tujuan dalam Renstra 2025–2029 yang tidak sesuai dengan satuan
   - Telah dilakukan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Gresik untuk melakukan penyesuaian satuan pada Indikator Kinerja Tujuan yang tidak sesuai, agar sejalan dengan ketentuan teknis penyusunan dokumen Renstra.
   - Link : Renstra 2025-2029
4. Agar menyusun IKU dengan definisi operasional yang jelas atas kinerja
   - Perangkat daerah telah melakukan reviu dan penyempurnaan terhadap indikator kinerja utama (IKU) agar memiliki definisi operasional yang lebih terukur, relevan, dan mudah dievaluasi dalam laporan kinerja.
   - Link : IKU SETWAN 2026

5. Agar melampirkan bukti pendukung evaluasi Renja Triwulan IV dengan daftar hadir seluruh pegawai, notulen tidak hanya membahas SIPD namun membahas evaluasi Renja
   - Telah dilakukan perbaikan pada pelaksanaan evaluasi Renja Triwulan IV dengan melampirkan daftar hadir seluruh pegawai dan notulen rapat yang mencerminkan pembahasan capaian Renja secara menyeluruh, bukan hanya terkait aplikasi SIPD.
   - Link : Rapat Monev Triwulan IV Tahun 2024
6. Agar menyusun LKjIP sesuai dengan standar yaitu Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja
   - Penyusunan LKjIP telah disesuaikan dengan pedoman Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, termasuk analisis capaian kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya, serta langkah perbaikan berkelanjutan.
   - Link : LKjIP 2024
7. Agar melampirkan SKP Perilaku Kinerja dan menyusun LKjIP dengan perubahan budaya
   - Sekretariat DPRD telah melampirkan dokumen SKP dan penilaian perilaku kinerja sebagai bagian dari penguatan budaya kerja berorientasi hasil dan penyusunan LKjIP yang mencerminkan nilai perubahan budaya.
   - Link : SKP Tahun 2024
8. Agar upload dokumen pada aplikasi SIAKRI sesuai dengan uraian
   - Dokumen hasil perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja telah diunggah ke dalam aplikasi SIAKRI secara lengkap dan sesuai dengan format yang ditetapkan.
   - Link : SS Kelengkapan dokumen SIAKRI

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan dokumen yang disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean goverment*) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak.

Secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat – rapat DPRD serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bagian dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penerjemahan dari Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2025 terdiri 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) indikator yang secara umum, dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dengan kategori **Sangat Memuaskan.**

Beberapa permasalahan yang menyebabkan kinerja sasaran rendah yaitu :

1. Jadwal Kegiatan sering mengalami perubahan menyesuaikan hasil Rapat Badan Musyawarah, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal;
2. Adanya kegiatan yang bersifat insidentiil dan tidak direncanakan sebelumnya, sehingga mengganggu program – program yang lain.

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran yang sudah baik dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengertian kepada Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD untuk memperhatikan / konsisten terhadap rencana kegiatan yang telah dijadwalkan;
2. Melaksanakan kegiatan yang bersifat insidentiil tersebut secara maksimal, dan untuk perencanaan di tahun berikutnya bisa diakomodir, sehingga dalam melaksankan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD terbentuk Sistem Informasi dan Manajemen yang baik.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik 2025 – 2029 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja utama tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pada tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026, secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Gresik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik ini,diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Gresik.

Gresik, 27 Februari 2026
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN GRESIK

Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011

LAMPIRAN I

Rencana Strategis (RS) 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*(14)*	*(15)*
4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.005.993.000		6.184.116.000		6.411.206.000		6.732.388.000		6.937.920.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	50	6.005.993.000	50	6.184.116.000	50	6.411.206.000	50	6.732.388.000	50	6.937.920.000		
4.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan				232.393.000		239.285.000		248.075.000		260.500.000		268.452.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5	5	232.393.000	5	239.285.000	5	248.075.000	5	260.500.000	5	268.452.000		
4.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				17.950.000		18.482.000		19.160.000		20.120.000		20.735.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	17.950.000	5	18.482.000	5	19.160.000	5	20.120.000	5	20.735.000		
4.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran				15.770.000		16.238.000		16.834.000		17.678.000		18.217.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	9	9	15.770.000	9	16.238.000	9	16.834.000	9	17.678.000	9	18.217.000		
4.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				8.292.000		8.538.000		8.852.000		9.295.000		9.580.000		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	94	1	8.292.000	1	8.538.000	1	8.852.000	1	9.295.000	1	9.580.000		
4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				193.628.000		200.387.000		208.318.000		218.500.000		225.913.000		
Terpenuhinya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	47	45	193.628.000	48	200.387.000	48	208.318.000	48	218.500.000	48	225.913.000		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				107.120.713.000		110.297.662.000		114.347.946.000		120.076.444.000		123.742.229.000		
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				47.640.808.000		49.102.726.000		50.882.622.000		53.577.390.000		54.991.496.000		
Terselenggaranya layanan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (Angka)	100	100	47.640.808.000	100	49.102.726.000	100	50.882.622.000	100	53.577.390.000	100	54.991.496.000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	86,52	86,6		86,65		86,7		86,75		86,8			
	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kesekretariatan (Angka)	100	100		100		100		100		100			
4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				613.657.000		631.882.000		650.648.000	30	669.973.000	29	689.870.000		
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	10	29	613.657.000	-	631.882.000	-	650.648.000	-	669.973.000	-	689.870.000		
4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				299.692.000,00		308.594.000		317.758.000		327.196.000		336.913.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	8	299.692.000	8	308.594.000	8	317.758.000	9	327.196.000	8	336.913.000		
4.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				200.945.000		206.913.000		213.058.000		219.386.000		225.902.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	17	200.945.000	17	206.913.000	17	213.058.000	17	219.386.000	17	225.902.000		
4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				113.020.000		116.375.000		119.832.000		123.391.000		127.055.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	4	113.020.000	4	116.375.000	4	119.832.000	4	123.391.000	4	127.055.000		
4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.280.398.000		6.466.659.000		6.704.127.000		7.039.981.000		7.254.904.000		
Terpenuhinya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	46	60	6.256.336.000	60	6.441.883.000	60	6.678.441.000	60	7.013.008.000	60	7.227.107.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut				50.000.000		52.500.000		55.000.000		57.500.000		60.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.000.000	1	57.500.000	1	60.000.000		
4.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi				5.117.000		5.268.000		5.462.000		5.735.000		5.910.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	17	17	5.117.000	17	5.268.000	17	5.462.000	17	5.735.000	17	5.910.000		
4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				117.962.000		121.461.000		125.921.000		132.230.000		136.266.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	22	22	117.962.000	22	121.461.000	22	125.921.000	22	132.230.000	22	136.266.000		
4.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20.549.000		21.158.000		21.935.000		23.035.000		23.737.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8	5	20.549.000	8	21.158.000	8	21.935.000	8	23.035.000	8	23.737.000		
4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.230.198.000		1.266.587.000		1.308.529.000		1.360.670.000		1.401.519.000		
Terpenuhinya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	572	459	1.230.198.000	459	1.266.587.000	459	1.308.529.000	459	1.360.670.000	459	1.401.519.000		
4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				93.125.000		95.887.000		99.408.000		104.388.000		107.575.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	93.125.000	1	95.887.000	1	99.408.000	1	104.388.000	1	107.575.000		
4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				181.300.000		186.677.000		193.532.000		203.227.000		209.431.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	3	181.300.000	3	186.677.000	3	193.532.000	3	203.227.000	3	209.431.000		
4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				75.014.000		77.239.000		80.075.000		84.087.000		86.654.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	75.014.000	2	77.239.000	2	80.075.000	2	84.087.000	2	86.654.000		
4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				82.676.000		85.128.000		88.254.000		92.675.000		95.504.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	74	60	82.676.000	60	85.128.000	60	88.254.000	60	92.675.000	60	95.504.000		
4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				183.660.000		189.107.000		196.051.000		205.873.000		212.158.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	7	183.660.000	7	189.107.000	7	196.051.000	7	205.873.000	7	212.158.000		
4.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				136.031.000		140.044.000		144.175.000		148.428.000		152.807.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	461	360	136.031.000	360	140.044.000	360	144.175.000	360	148.428.000	360	152.807.000		
4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi				204.215.000		210.240.000		216.442.000		222.827.000		229.400.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	20	204.215.000	20	210.240.000	20	216.442.000	20	222.827.000	20	229.400.000		
4.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				274.177.000		282.265.000		290.592.000		299.165.000		307.990.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	6	274.177.000	6	282.265.000	6	290.592.000	6	299.165.000	6	307.990.000		
4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				174.809.000		179.228.000		183.778.000		188.462.000		193.285.000		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	10	287	174.809.000	287	179.228.000	287	183.778.000	287	188.462.000	287	193.285.000		
4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	186	25.000.000	186	25.000.000	186	25.000.000	186	25.000.000	186	25.000.000		
4.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				149.809.000		154.228.000		158.778.000		163.462.000		168.285.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	101	149.809.000	101	154.228.000	101	158.778.000	101	163.462.000	101	168.285.000		
4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				2.691.745.000		2.769.754.000		2.867.000.000		3.000.898.000		3.090.556.000		
Tersusunnya laporan hasil penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	242	167	2.691.745.000	167	2.769.754.000	167	2.867.000.000	167	3.000.898.000	167	3.090.556.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				27.858.000		28.684.000		29.737.000		31.227.000		32.181.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	90	90	27.858.000	90	28.684.000	90	29.737.000	90	31.227.000	90	32.181.000		
4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air				400.000.000		411.800.000		423.948.000		436.454.000		449.330.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	12	400.000.000	12	411.800.000	12	423.948.000	12	436.454.000	12	449.330.000		
4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.263.887.000		2.329.270.000		2.413.315.000		2.533.217.000		2.609.045.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	149	65	2.263.887.000	65	2.329.270.000	65	2.413.315.000	65	2.533.217.000	65	2.609.045.000		
4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.281.762.000		1.319.619.000		1.360.625.000		1.406.912.000		1.448.739.000		
Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dan layak digunakan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	294	257	1.281.762.000	257	1.319.619.000	257	1.360.625.000	257	1.406.912.000	257	1.448.739.000		
4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				222.219.000		228.775.000		235.523.000		242.471.000		249.625.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4	222.219.000	4	228.775.000	4	235.523.000	4	242.471.000	4	249.625.000		
4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau				317.000.000		326.352.000		335.979.000		345.890.000		356.094.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	19	317.000.000	19	326.352.000	19	335.979.000	19	345.890.000	19	356.094.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				33.500.000		34.488.000		35.506.000		36.553.000		37.631.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	156	120	33.500.000	120	34.488.000	120	35.506.000	120	36.553.000	120	37.631.000		
4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				138.932.000		143.031.000		147.250.000		151.595.000		156.066.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	101	101	138.932.000	101	143.031.000	101	147.250.000	101	151.595.000	101	156.066.000		
4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				290.508.000		299.078.000		307.900.000		316.983.000		326.335.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	290.508.000	2	299.078.000	2	307.900.000	2	316.983.000	2	326.335.000		
4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				279.603.000		287.895.000		298.467.000		313.420.000		322.988.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	11	279.603.000	11	287.895.000	11	298.467.000	11	313.420.000	11	322.988.000		
4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				34.998.666.000		36.088.129.000		37.413.334.000		39.287.633.000		40.487.036.000		
Terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	67	67	34.998.666.000	67	36.088.129.000	67	37.413.334.000	67	39.287.633.000	67	40.487.036.000		
4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi				34.344.330.000		35.414.386.000		36.714.851.000		38.554.158.000		39.731.169.000		
Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	50	50	34.344.330.000	50	35.414.386.000	50	36.714.851.000	50	38.554.158.000	50	39.731.169.000		
4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				578.952.000		596.123.000		618.013.000		648.973.000		668.786.000		
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	5	5	578.952.000	5	596.123.000	5	618.013.000	5	648.973.000	5	668.786.000		
4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				75.384.000		77.620.000		80.470.000		84.502.000		87.081.000		
Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	50	50	75.384.000	50	77.620.000	50	80.470.000	50	84.502.000	50	87.081.000		
4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD				175.945.000		180.481.000		186.263.000		404.361.000		199.674.000		
Terpenuhinya layanan administrasi DPRD	Jumlah dokumen layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	30	32	175.945.000	32	180.481.000	32	186.263.000	32	404.361.000	32	199.674.000		
4.02.01.2.16.0001 - Penyelenggaraan Administrasi				50.256.000		51.747.000		53.647.000		56.335.000		58.055.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	10	10	50.256.000	10	51.747.000	10	53.647.000	10	56.335.000	10	58.055.000		
4.02.01.2.16.0002 - Fasilitasi Fraksi DPRD				23.026.000		23.026.000		23.026.000		23.026.000		23.026.000		
Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	10	12	23.026.000	12	23.026.000	12	23.026.000	12	23.026.000	12	23.026.000		
4.02.01.2.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				102.663.000		105.708.000		109.590.000		325.000.000		118.593.000		
Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	10	10	102.663.000	10	105.708.000	10	109.590.000	10	325.000.000	10	118.593.000		
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				59.479.905.000		61.194.936.000		63.465.324.000		66.499.054.000		68.750.733.000		
Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dprd	Presentase Dukungan Fasilitas Pelaksanaan Tugas DPRD (%)	100	100	18.735.889.000	100	19.278.899.000	100	19.966.263.000	100	21.408.461.000	100	21.555.799.000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN	
4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD				9.303.394.000		9.567.452.000		9.902.797.000		10.852.963.000		10.679.350.000		
Terfasilitasinya kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang	467	478	9.303.394.000	478	9.567.452.000	478	9.902.797.000	478	10.852.963.000	526	10.679.350.000		
4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD				99.000.000		99.000.000		99.000.000		576.968.000		99.000.000		
Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	0	2	99.000.000	2	99.000.000	2	99.000.000	2	576.968.000	50	99.000.000		
4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD				3.993.830.000		4.112.277.000		4.263.290.000		4.476.865.000		4.613.540.000		
Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	6	6	3.993.830.000	6	4.112.277.000	6	4.263.290.000	6	4.476.865.000	6	4.613.540.000		
4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	0	9	300.000.000	9	300.000.000	9	300.000.000	9	300.000.000	9	300.000.000		
4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				253.825.000		261.355.000		270.950.000		284.525.000		293.210.000		
Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	6	6	253.825.000	6	261.355.000	6	270.950.000	6	284.525.000	6	293.210.000		
4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan				179.365.000		184.655.000		190.100.000		195.710.000		201.485.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*(14)*	*(15)*
Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	24	24	179.365.000	24	184.655.000	24	190.100.000	24	195.710.000	24	201.485.000		
4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD				385.000.000		396.425.000		410.980.000		431.570.000		444.745.000		
Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1	1	385.000.000	1	396.425.000	1	410.980.000	1	431.570.000	1	444.745.000		
4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD				4.092.374.000		4.213.740.000		4.368.477.000		4.587.325.000		4.727.370.000		
Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	430	430	4.092.374.000	430	4.213.740.000	430	4.368.477.000	430	4.587.325.000	430	4.727.370.000		
4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD				9.432.495.000		9.711.447.000		10.063.466.000		10.555.498.000		10.876.449.000		
Terfasilitasinya tugas DPRD	Jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi tugas DPRD	244	243	9.432.495.000	243	9.711.447.000	243	10.063.466.000	243	10.555.498.000	243	10.876.449.000		
4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas				3.361.680.000		3.461.382.000		3.588.488.000		3.768.260.000		3.883.300.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	116	116	3.361.680.000	116	3.461.382.000	116	3.588.488.000	116	3.768.260.000	116	3.883.300.000		
4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				388.385.000		399.900.000		414.586.000		435.355.000		448.645.000		
Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	6	5	388.385.000	5	399.900.000	5	414.586.000	5	435.355.000	5	448.645.000		
4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan				24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	12	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000		
4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				5.158.430.000		5.311.415.000		5.506.457.000		5.782.315.000		5.958.840.000		
Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	108	108	5.158.430.000	108	5.311.415.000	108	5.506.457.000	108	5.782.315.000	108	5.958.840.000		
4.02.02.2.08.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				500.000.000		514.750.000		529.935.000		545.568.000		561.664.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	2	2	500.000.000	2	514.750.000	2	529.935.000	2	545.568.000	2	561.664.000		
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	17.867.233.000	100	18.396.820.000	100	19.057.630.000	100	19.969.060.000	100	20.576.464.000		
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran				1.797.531.000		1.850.842.000		1.918.807.000		2.014.930.000		2.076.448.000		
Terfasilitasinya kegiatan pembahasan kebijakan anggaran	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	22	22	1.797.531.000	22	1.850.842.000	22	1.918.807.000	22	2.014.930.000	22	2.076.448.000		
4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS				357.092.000		367.683.000		381.185.000		400.280.000		412.501.000		
Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	4	4	357.092.000	4	367.683.000	4	381.185.000	4	400.280.000	4	412.501.000		
4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan				352.802.000		363.265.000		376.604.000		395.470.000		407.545.000		
Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	4	4	352.802.000	4	363.265.000	4	376.604.000	4	395.470.000	4	407.545.000		
4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD				348.053.000		358.376.000		371.536.000		390.148.000		402.060.000		
Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	4	4	348.053.000	4	358.376.000	4	371.536.000	4	390.148.000	4	402.060.000		
4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan				357.928.000		368.543.000		382.076.000		401.217.000		413.466.000		
Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	4	4	357.928.000	4	368.543.000	4	382.076.000	4	401.217.000	4	413.466.000		
4.02.02.2.02.0005 - Pembahasan Laporan Semester				46.994.000		48.388.000		50.165.000		52.678.000		54.286.000		
Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	2	2	46.994.000	2	48.388.000	2	50.165.000	2	52.678.000	2	54.286.000		
4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				334.662.000		344.587.000		357.241.000		375.137.000		386.590.000		
Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	4	4	334.662.000	4	344.587.000	4	357.241.000	4	375.137.000	4	386.590.000		
4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				13.267.597.000		13.061.083.000		13.562.736.000		14.272.250.000		14.726.279.000		
Terfasilitasinya kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	204	204	13.267.597.000	204	13.061.083.000	204	13.562.736.000	204	14.272.250.000	204	14.726.279.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*(14)*	*(15)*
4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				3.016.527.000		2.955.990.000		3.070.046.000		3.231.361.000		3.334.590.000		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	48	48	3.016.527.000	48	2.955.990.000	48	3.070.046.000	48	3.231.361.000	48	3.334.590.000		
4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang				3.195.862.000		3.140.644.000		3.261.481.000		3.432.386.000		3.541.752.000		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	48	48	3.195.862.000	48	3.140.644.000	48	3.261.481.000	48	3.432.386.000	48	3.541.752.000		
4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				3.086.742.000		3.028.288.000		3.145.000.000		3.310.070.000		3.415.700.000		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	48	48	3.086.742.000	48	3.028.288.000	48	3.145.000.000	48	3.310.070.000	48	3.415.700.000		
4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang				3.222.396.000		3.167.965.000		3.289.805.000		3.462.130.000		3.572.403.000		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	48	48	3.222.396.000	48	3.167.965.000	48	3.289.805.000	48	3.462.130.000	48	3.572.403.000		
4.02.02.2.03.0006 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				345.641.000		355.892.000		368.960.000		387.444.000		399.272.000		
Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	2	2	345.641.000	2	355.892.000	2	368.960.000	2	387.444.000	2	399.272.000		
4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran				29.367.000		30.238.000		31.348.000		32.919.000		33.924.000		
Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	6	6	29.367.000	6	30.238.000	6	31.348.000	6	32.919.000	6	33.924.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				371.062.000		382.066.000		396.096.000		415.940.000		428.638.000		
Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	4	4	371.062.000	4	382.066.000	4	396.096.000	4	415.940.000	4	428.638.000		
4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				2.412.025.000		3.083.300.000		3.162.301.000		3.254.870.000		3.334.079.000		
Terfasilitasinya kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi	5	5	2.412.025.000	55	3.083.300.000	55	3.162.301.000	55	3.254.870.000	55	3.334.079.000		
4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				772.330.000		795.235.000		824.438.000		865.740.000		892.170.000		
Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	2	2	772.330.000	2	795.235.000	2	824.438.000	2	865.740.000	2	892.170.000		
4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses				1.639.695.000		1.688.065.000		1.737.863.000		1.789.130.000		1.841.909.000		
Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	3	3	1.639.695.000	3	1.688.065.000	3	1.737.863.000	3	1.789.130.000	3	1.841.909.000		
4.02.02.2.05.0004 - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				0		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	0	0	0	5000	600.000.000	5000	600.000.000	5000	600.000.000	5000	600.000.000		
4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				246.195.000		253.465.000		261.286.000		270.010.000		278.028.000		
Terfasilitasinya kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	6	6	246.195.000	6	253.465.000	6	261.286.000	6	270.010.000	6	278.028.000		
4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD				200.000.000		205.900.000		211.974.000		218.227.000		224.665.000		
Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	2	2	200.000.000	2	205.900.000	2	211.974.000	2	218.227.000	2	224.665.000		
4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD				46.195.000		47.565.000		49.312.000		51.783.000		53.363.000		
Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	4	4	46.195.000	4	47.565.000	4	49.312.000	4	51.783.000	4	53.363.000		
4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah				143.885.000		148.130.000		152.500.000		157.000.000		161.630.000		
Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pembahasan kerjasama daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)			143.885.000	2	148.130.000	2	152.500.000	2	157.000.000	2	161.630.000		
4.02.02.2.07.0001 - Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				143.885.000		148.130.000		152.500.000		157.000.000		161.630.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)			143.885.000	2	148.130.000	2	152.500.000	2	157.000.000	2	161.630.000		
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	100	22.876.783.000	100	23.519.217.000	100	24.441.431.000	100	25.121.533.000	100	26.618.470.000		
4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan				22.876.783.000		23.519.217.000		24.441.431.000		25.121.533.000		26.618.470.000		
Terfasilitasinya kegiatan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	16	566	22.876.783.000	566	23.519.217.000	566	24.441.431.000	566	25.121.533.000	566	26.618.470.000		
4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				389.145.000		400.686.000		415.400.000		436.210.000		449.527.000		
Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	2	2	389.145.000	2	400.686.000	2	415.400.000	2	436.210.000	2	449.527.000		
4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				2.823.429.000		2.907.165.000		3.013.920.000		3.164.910.000		3.261.530.000		
Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	8	8	2.823.429.000	8	2.907.165.000	8	3.013.920.000	8	3.164.910.000	8	3.261.530.000		
4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-				794.049.000		817.600.000		847.621.000		890.085.000		917.260.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	1	1	794.049.000	1	817.600.000	1	847.621.000	1	890.085.000	1	917.260.000		
4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				2.513.644.000		2.588.192.000		2.683.235.000		2.817.655.000		2.903.675.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4	4	2.513.644.000	4	2.588.192.000	4	2.683.235.000	4	2.817.655.000	4	2.903.675.000		
4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD				354.684.000		365.147.000		375.920.000		387.010.000		398.425.000		
Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1	1	354.684.000	1	365.147.000	1	375.920.000	1	387.010.000	1	398.425.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.02.02.2.01.0006 - Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan				16.001.832.000		16.440.427.000		17.105.335.000		17.425.663.000		18.688.053.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang)	0	64.800	16.001.832.000	64.800	16.440.427.000	64.800	17.105.335.000	64.800	17.425.663.000	64.800	18.688.053.000		

LAMPIRAN II

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025

Tabel 8
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN GRESIK
(HASIL FORUM OPD)

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Satuan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**									**92.575.589.478**					**100.114.734.491**
	4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									**41.868.887.098**					**45.097.962.409**
	4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									**339.345.689**			**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	**30 Dokumen**	**368.190.073**
1	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Kab.Gresik	A Nilai	9 Dokumen	100%	152.779.345	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	165.765.589
2	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Kab.Gresik	A Nilai	17 Laporan	100%	126.065.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	136.780.634
3	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Kab.Gresik	A Nilai	4 Laporan	100%	60.501.244	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	65.643.850
	4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									**4.834.226.858**			**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi**	**15 Dokumen**	**4.915.356.048**

4	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Orang	Kab.Gresik	A Nilai	30 Orang/bulan	100%	4.711.144.178	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	4.781.811.341
5	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tercukupinya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	Kab.Gresik	A Nilai	1238 Dokumen	100%	81.168.125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1238 Dokumen	88.067.416
6	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercukupinya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	Kab.Gresik	A Nilai	5 Laporan	100%	17.859.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	19.377.840
7	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tercukupinya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	Kab.Gresik	A Nilai	9 Laporan	100%	15.777.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	9 Laporan	17.118.436
8	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tercukupinya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	Kab.Gresik	A Nilai	1 Dokumen	100%	8.277.435	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	8.981.017
	4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									**142.895.530**			**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**17 Dokumen**	**155.041.650**
9	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tercukupinya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	Kab.Gresik	100%	17 Dokumen	100%	5.090.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen	5.523.193
10	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tercukupinya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	Kab.Gresik	100%	13 Orang	100%	117.361.030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	127.336.718

11	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tercukupinya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	Kab.Gresik	100%	5 Orang	100%	20.444.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	22.181.740
	4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									**502.419.071**			**1. Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan**	**230 Dokumen**	**545.124.692**
														2. Tingkat kematangan layanan aspirasi masyarakat	**Tingkat 3**	
12	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tercukupinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	Kab.Gresik	100%	1 Paket	100%	53.726.088	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.292.805
13	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tercukupinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	Kab.Gresik	100%	1 Paket	100%	76.335.792	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	82.824.334
14	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tercukupinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	Kab.Gresik	100%	1 Paket	100%	50.397.872	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	54.681.691
15	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tercukupinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	Kab.Gresik	100%	74 Paket	100%	82.254.324	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	74 Paket	89.245.942
16	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tercukupinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	Kab.Gresik	100%	5 Paket	100%	82.723.575	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	89.755.079
17	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercukupinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	Kab.Gresik	100%	132 Laporan	100%	63.515.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	132 Laporan	68.914.318
18	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercukupinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	Kab.Gresik	100%	15 Laporan	100%	65.145.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	70.683.323
19	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	Tercukupinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	Kab.Gresik	100%	1 Dokumen	100%	28.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	1 Dokumen	30.727.200

	4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									**0**			**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**2 Unit**	**0**
20	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	Kab.Gresik	100%	2 Unit	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0
	4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									**2.621.015.800**			**Jumlah laporan hasil penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**137 Laporan**	**2.843.802.143**
21	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	Kab.Gresik	100%	50 Laporan	100%	18.239.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	19.790.183
22	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	Kab.Gresik	100%	12 Laporan	100%	325.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	353.232.600
23	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	Kab.Gresik	100%	75 Laporan	100%	2.277.216.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75 Laporan	2.470.779.360
	4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									**537.416.150**			**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**85 Unit**	**583.096.523**
24	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	Kab.Gresik	100%	4 Unit	100%	83.507.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	90.605.095

25	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	Kab.Gresik	100%	15 Unit	100%	105.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	114.196.250
26	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	Kab.Gresik	100%	50 Unit	100%	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	5.425.000
27	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	Kab.Gresik	100%	10 Unit	100%	37.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	40.665.800
28	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	Kab.Gresik	100%	2 Unit	100%	99.635.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	108.104.789
29	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Sarana dan PrasaranJumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	Kab.Gresik	100%	4 Unit	100%	206.543.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan PrasaranJumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	224.099.589
	4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**									**32.754.428.000**			**Jumlah anggota DPRD yang menerima layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**50 Orang**	**35.538.554.380**
30	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Orang/Bulan	Kab.Gresik	100%	50 Orang/bulan	100%	32.303.428.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/bulan	35.049.219.380
31	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Paket	Kab.Gresik	100%	5 Paket	100%	376.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	407.960.000
32	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Orang	Kab.Gresik	100%	50 Orang	100%	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	81.375.000
	4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**									**137.140.000**			**Jumlah laporan pelayanan administrasi DPRD yang terpenuhi**	**10 Laporan**	**148.796.900**

33	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD	Dokumen	Kab.Gresik	100%	5 Dokumen	100%	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	5 Dokumen	37.975.000
34	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD	Laporan	Kab.Gresik	100%	5 Laporan	100%	102.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	5 Laporan	110.821.900
	4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**									**50.706.702.380**					**55.016.772.082**
	4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**									**10.108.093.509**			**Jumlah dokumen hasil kegiatan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi**	**16 Dokumen**	**10.967.281.457**
35	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan regulasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terfasilitasinya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Dokumen	Kab.Gresik	100%	2 Dokumen	100%	437.379.109	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	474.556.333
36	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan regulasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terfasilitasinya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Dokumen	Kab.Gresik	100%	8 Dokumen	100%	1.993.108.095	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	2.162.522.283
37	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan regulasi DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Terfasilitasinya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Dokumen	Kab.Gresik	100%	1 Dokumen	100%	400.350.038	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	434.379.791
38	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan regulasi DPRD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan proses penyusunan naskah akademik dan Ranperda inisiatif DPRD	Terfasilitasinya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Dokumen	Kab.Gresik	100%	4 Dokumen	100%	1.877.256.267	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah fasilitasi pelaksanaan proses penyusunan naskah akademik dan Ranperda inisiatif DPRD	4 Dokumen	2.036.823.050

39	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan regulasi DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Terfasilitasinya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Dokumen	Kab.Gresik	100%	1 Dokumen	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	0
40	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan regulasi DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Orang	Kab.Gresik	100%	120.000 orang	100%	5.400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang	120.000 orang	5.859.000.000
	4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**									**1.636.987.900**			**Jumlah laporan hasil kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi**	**26 Dokumen**	**1.776.131.872**
41	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Terfasilitasinya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen	Kab.Gresik	100%	4 Dokumen	100%	317.353.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4 Dokumen	344.328.385
42	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terfasilitasinya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen	Kab.Gresik	100%	4 Dokumen	100%	326.267.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4 Dokumen	354.000.400
43	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Terfasilitasinya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen	Kab.Gresik	100%	6 Dokumen	100%	315.592.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	6 Dokumen	342.418.351
44	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Terfasilitasinya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen	Kab.Gresik	100%	4 Dokumen	100%	338.277.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4 Dokumen	367.031.467
45	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Terfasilitasinya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen	Kab.Gresik	100%	4 Dokumen	100%	17.450.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	4 Dokumen	18.934.010

46	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terfasilitasinya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen	Kab.Gresik	100%	4 Dokumen	100%	322.045.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4 Dokumen	349.419.259
	4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**									**16.543.693.400**			**Jumlah laporan hasil kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi**	**251 Laporan**	**17.949.907.339**
47	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terfasilitasinya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	Kab.Gresik	100%	60 Laporan	100%	3.826.580.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	60 Laporan	4.151.839.571
48	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terfasilitasinya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	Kab.Gresik	100%	60 Laporan	100%	3.826.579.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	60 Laporan	4.151.839.192
49	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terfasilitasinya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	Kab.Gresik	100%	60 Laporan	100%	4.377.563.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60 Laporan	4.749.656.669
50	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terfasilitasinya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	Kab.Gresik	100%	60 Laporan	100%	3.826.579.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	60 Laporan	4.151.839.192
51	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terfasilitasinya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen	Kab.Gresik	100%	1 Dokumen	100%	322.972.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	350.424.891
52	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terfasilitasinya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen	Kab.Gresik	100%	6 Dokumen	100%	29.217.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	6 Dokumen	31.700.662

53	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terfasilitasinya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen	Kab.Gresik	100%	4 Dokumen	100%	334.200.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4 Dokumen	362.607.163
	4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**									**7.273.110.667**			**Jumlah dokumen hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**292 Dokumen**	**7.891.325.074**
54	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen	Kab.Gresik	A Kualitas	6 Dokumen	100%	2.444.948.756	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2.652.769.400
55	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah tenaga ahli Fraksi	Terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Orang	Kab.Gresik	A Kualitas	7 Orang	100%	252.530.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah tenaga ahli Fraksi	7 Orang	273.995.050
56	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen	Kab.Gresik	A Kualitas	24 Dokumen	100%	152.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	24 Dokumen	165.451.650
57	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen	Kab.Gresik	A Kualitas	1 Dokumen	100%	351.637.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	381.526.416
58	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen	Kab.Gresik	A Kualitas	261 Dokumen	100%	4.071.504.661	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	261 Dokumen	4.417.582.557
	4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**									**1.970.163.150**			**Jumlah dokumen hasil kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi**	**7 Dokumen**	**2.137.627.018**
59	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Terfasilitasinya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen	Kab.Gresik	100%	4 Dokumen	100%	768.392.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	4 Dokumen	833.705.700
60	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Terfasilitasinya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen	Kab.Gresik	100%	3 Dokumen	100%	1.201.770.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1.303.921.318

	4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**									**45.960.000**			**Jumlah laporan hasil kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi**	**2 Laporan**	**49.866.600**
61	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Terfasilitasinya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	Kab.Gresik	100%	2 Laporan	100%	45.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	49.866.600
	4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**									**13.128.693.754**			**Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas DPRD**	**128 Dokumen**	**14.244.632.723**
62	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terfasilitasinya Tugas DPRD	Dokumen	Kab.Gresik	A Kualitas	12 Dokumen	100%	5.777.154.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	6.268.212.633
63	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Fraksi. Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Terfasilitasinya Tugas DPRD	Laporan	Kab.Gresik	A Kualitas	6 Laporan	100%	353.470.375	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fraksi. Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	6 Laporan	383.515.357
64	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terfasilitasinya Tugas DPRD	Dokumen	Kab.Gresik	A Kualitas	24 Dokumen	100%	25.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24 Dokumen	27.342.000
65	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terfasilitasinya Tugas DPRD	Dokumen	Kab.Gresik	A Kualitas	86 Dokumen	100%	6.972.868.879	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	86 Dokumen	7.565.562.734

LAMPIRAN III

Perjanjian Kinerja 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Jabatan	:	SEKRETARIS DPRD

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama	:	FANDI AKHMAD YANI
Jabatan	:	Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KEDUA BUPATI GRESIK	PIHAK KESATU SEKRETARIS DPRD
FANDI AKHMAD YANI	Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 196804121992031011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	1	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen
2	Meningkatnya kualitas pelayanan atas dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1	Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	-
		2	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD	-
		3	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD	-
		4	Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan	-

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 49,805,462,323.77	PAPBD
2	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp. 50,262,307,633.00	PAPBD
Jumlah			Rp. 100,067,769,956.77	

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DPRD

Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011

LAMPIRAN IV

Pengukuran Kinerja 2025

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Kabupaten/Kota : Gresik
Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD
Periode Renja PD : 2023
Periode RKA PD : 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	FORMULASI	Target		Realisasi																								Capaian	
								Kinerja	Satuan	Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Agst		Sept		Okt		Nop		Des		Jumlah	Persen
										K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%
4	**02**	**1**			**SEKRETARIAT DPRD**	**Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**Jumlah Pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi dibagi Jumlah Pelaksanaan tugas DPRD Berdasarkan Renja DPRD dikali 100%**	**100**	**%**	**58**	**8%**	**74**	**10%**	**62**	**9%**	**61**	**8%**	**63**	**9%**	**65**	**9%**	**67**	**9%**	**61**	**8%**	**57**	**8%**	**61**	**8%**	**63**	**9%**	**51**	**7%**	**743**	**103%**
4	**02**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**16%**		**4%**		**6%**		**6%**		**6%**		**9%**		**9%**		**6%**		**12%**		**12%**		**8%**		**9%**		95%
Indikator Program						**Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai Sakip dari Inspektorat Kabupaten**	**A**	**Nilai**	**6%**	**16%**	**5%**	**4%**	**6%**	**6%**	**9%**	**6%**	**9%**	**6%**	**10%**	**9%**	**11%**	**9%**	**9%**	**6%**	**7%**	**12%**	**11%**	**12%**	**12%**	**8%**	**12%**	**9%**	**108%**	100%
4	**02**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	**30**	**Dokumen**	**8**	**27%**	**1**	**3%**	**2**	**7%**	**1**	**3%**	**1**	**3%**	**2**	**7%**	**2**	**7%**	**1**	**3%**	**5**	**17%**	**4**	**13%**	**1**	**3%**	**2**	**7%**	**30**	100%
4	02	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	3	33%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	11%	-	0%	3	33%	2	22%	-	0%	-	0%	9	100%
4	02	1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	Laporan	2	12%	1	6%	2	12%	1	6%	1	6%	2	12%	1	6%	1	6%	2	12%	1	6%	1	6%	2	12%	17	100%
4	02	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	3	75%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	25%	-	0%	-	0%	4	100%
4	**02**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi**	**1253**	**Dokumen**	**69**	**6%**	**69**	**6%**	**74**	**6%**	**114**	**9%**	**119**	**9%**	**130**	**10%**	**144**	**11%**	**109**	**9%**	**89**	**7%**	**139**	**11%**	**147**	**12%**	**149**	**12%**	**1.352**	108%
4	02	**1**	**2.02**	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Orang/bulan	31	103%	31	103%	31	103%	31	103%	31	103%	31	103%	35	117%	35	117%	33	110%	33	110%	33	110%	33	110%	32	108%
4	02	1	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1238	Dokumen	60	5%	60	5%	60	5%	105	8%	110	9%	120	10%	135	11%	100	8%	80	6%	130	11%	138	11%	140	11%	1.238	100%
4	02	1	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	-	0%	-	0%	5	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	5	100%
4	02	1	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9	Laporan	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%
4	02	1	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	100%
Indikator Program						**Persentase ketercapaian sasaran program Perangkat Daerah**	**Jumlah capaian program minimal 76%/jumlah program**	**100**	**%**																											**100%**	2103%
4	**02**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**35**	**Dokumen**	**1**	**3%**	**3**	**9%**	**1**	**3%**	**4**	**11%**	**4**	**11%**	**6**	**17%**	**5**	**14%**	**1**	**3%**	**5**	**14%**	**1**	**3%**	**8**	**23%**	**2**	**6%**	**41**	117%
4	02	1	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17	Dokumen	1	6%	1	6%	1	6%	2	12%	3	18%	2	12%	1	6%	1	6%	3	18%	1	6%	2	12%	2	12%	20	118%
4	02	1	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13	Orang	-	0%	2	15%	-	0%	-	0%	1	8%	4	31%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	6	46%	-	0%	13	100%
4	02	1	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	-	0%	-	0%	-	0%	2	40%	-	0%	-	0%	4	80%	-	0%	2	40%	-	0%	-	0%	-	0%	8	160%
4	**02**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1. Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan**	**1. Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan**	**229**	**Dokumen**	**53**	**23%**	**57**	**25%**	**38**	**17%**	**48**	**21%**	**39**	**17%**	**54**	**24%**	**49**	**21%**	**43**	**19%**	**43**	**19%**	**52**	**23%**	**44**	**19%**	**57**	**25%**	**576**	252%
4	02	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	100%
4	02	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	100%
4	02	1	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	1	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	100%
4	02	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	74	Paket	4	5%	7	9%	3	4%	6	8%	6	8%	4	5%	7	9%	8	11%	7	9%	7	9%	7	9%	8	11%	74	100%
4	02	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5	Paket	1	20%	1	20%	1	20%	-	0%	-	0%	1	20%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	20%	-	0%	5	100%
4	02	1	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	132	Laporan	43	33%	47	36%	30	23%	40	30%	33	25%	47	36%	42	32%	35	27%	36	27%	45	34%	36	27%	49	37%	483	366%
4	02	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Laporan	3	20%	2	13%	4	27%	2	13%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	11	73%
4	02	1	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	1	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	100%
4	**02**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**2**	**Unit**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**2**	**100%**	**54**	**2700%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**123**	**6150%**	**20**	**1000%**	**199**	9950%
4	02	1	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2	100%	54	2700%	-	0%	-	0%	-	0%	123	6150%	20	1000%	199	9950%
4	**02**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan hasil penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan hasil penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**137**	**Laporan**	**78**	**57%**	**81**	**59%**	**78**	**57%**	**80**	**58%**	**80**	**58%**	**78**	**57%**	**77**	**56%**	**67**	**49%**	**67**	**49%**	**67**	**49%**	**67**	**49%**	**62**	**45%**	**131**	96%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	FORMULASI	Target		Realisasi																								Capaian	
								Kinerja	Satuan	Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Agst		Sept		Okt		Nop		Des		Jumlah	Persen
4	02	1	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50	Laporan	3	6%	6	12%	3	6%	5	10%	5	10%	3	6%	5	10%	5	10%	5	10%	5	10%	5	10%	-	0%	50	100%
4	02	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	1	8%	1	8%	1	8%	1	8%	1	8%	1	8%	1	8%	1	8%	1	8%	1	8%	1	8%	1	8%	12	100%
4	02	1	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75	Laporan	74	99%	74	99%	74	99%	74	99%	74	99%	74	99%	71	95%	61	81%	61	81%	61	81%	61	81%	61	81%	69	92%
4	**02**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**85**	**Unit**	**7**	**8%**	**5**	**6%**	**18**	**21%**	**2**	**2%**	**0**	**0%**	**4**	**5%**	**0**	**0%**	**1**	**1%**	**9**	**11%**	**7**	**8%**	**12**	**14%**	**18**	**21%**	**85**	100%
4	02	1	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	1	25%	2	50%	1	25%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	4	100%
4	02	1	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	4	27%	3	20%	6	40%	2	13%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	15	100%
4	02	1	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	Unit	-	0%	-	0%	11	22%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	8	16%	6	12%	10	20%	15	30%	50	100%
4	02	1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10	Unit	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2	20%	-	0%	1	10%	1	10%	1	10%	2	20%	3	30%	10	100%
4	02	1	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	Unit	1	50%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	50%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2	100%
4	02	1	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	1	25%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	25%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	4	100%
4	**02**	**1**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Jumlah anggota DPRD yang menerima layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**Jumlah anggota DPRD yang menerima layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**50**	**Orang**	**50**	**100%**	**50**	**100%**	**50**	**100%**	**50**	**100%**	**50**	**100%**	**50**	**100%**	**50**	**100%**	**50**	**100%**	**50**	**100%**	**50**	**100%**	**50**	**100%**	**50**	**100%**	**26**	52%
4	02	1	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	Orang/Bulan	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%
4	02	1	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5	Paket	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	5	100%	-	0%	5	100%
4	02	1	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50	Orang	-	0%	2	4%	1	2%	2	4%	2	4%	4	8%	-	0%	1	2%	1	2%	4	8%	2	4%	2	4%	21	42%
4	**02**	**1**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Jumlah laporan pelayanan administrasi DPRD yang terpenuhi**	**Jumlah laporan pelayanan administrasi DPRD yang terpenuhi**	**10**	**Laporan**	**0**	**0%**	**1**	**10%**	**1**	**10%**	**2**	**20%**	**1**	**10%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**1**	**10%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**7**	**70%**	**13**	130%
4	02	1	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	5	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	1	20%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	7	140%	8	160%
4	02	1	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	5	Laporan	-	0%	1	20%	1	20%	1	20%	1	20%	-	0%	-	0%	1	20%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	5	100%
4	**02**	**2**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**722**	**Kegiatan**	**58**	**8%**	**74**	**10%**	**62**	**9%**	**61**	**8%**	**63**	**9%**	**65**	**9%**	**67**	**9%**	**61**	**8%**	**57**	**8%**	**61**	**8%**	**63**	**9%**	**51**	**7%**	**743**	**103%**
Indikator Program						**Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Penyusunan Regulasi DPRD**	**Jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi regulasi DPRD yang difasilitasi dibagi jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi regulasi DPRD berdasarkan Renja DPRD dikali 100**	**100**	**%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**6%**	**6%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**19%**	**19%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**25%**	**25%**	**13%**	**13%**	**31%**	**31%**	**94%**	100%
4	**02**	**2**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah dokumen hasil kegiatan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi**	**Jumlah dokumen hasil kegiatan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi**	**16**	**Dokumen**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**1**	**6%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**3**	**19%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**4**	**25%**	**2**	**13%**	**5**	**31%**	**15**	94%
4	02	2	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2	Dokumen	-	0%	-	0%	1	50%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	50%	-	0%	2	100%
4	02	2	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	3	38%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	5	63%	8	100%
4	02	2	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	100%	-	0%	1	100%
4	02	2	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	4	100%	-	0%	-	0%	4	100%
4	02	2	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%
4	02	2	2.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	120000	Orang	-	0%	5.400	5%	5.400	5%	5.400	5%	5.400	5%	5.400	5%	5.400	5%	5.400	5%	-	0%	8.640	7%	8.640	7%	-	0%	55.080	46%
						Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	**Jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD yang difasilitasi dibagi jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD berdasarkan Renja DPRD dikali 100**	**100**	**%**	**0%**	**5%**	**0%**	**7%**	**0%**	**4%**	**0%**	**4%**	**4%**	**6%**	**27%**	**10%**	**38%**	**39%**	**27%**	**11%**	**0%**	**4%**	**27%**	**11%**	**23%**	**9%**	**8%**	**4%**	**154%**	287%
4	**02**	**2**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah laporan hasil kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi**	**Jumlah laporan hasil kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi**	**26**	**Dokumen**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**1**	**4%**	**7**	**27%**	**10**	**38%**	**7**	**27%**	**0**	**0%**	**7**	**27%**	**6**	**23%**	**2**	**8%**	**40**	154%
4	02	2	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	7	175%	1	25%	-	0%	8	200%
4	02	2	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	7	175%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	7	175%
4	02	2	2.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	6	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	5	83%	1	17%	6	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	FORMULASI	Target		Realisasi																								Capaian	
								Kinerja	Satuan	Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Agst		Sept		Okt		Nop		Des		Jumlah	Persen
4	02	2	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	6	150%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	6	150%
4	02	2	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	4	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	3	75%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	25%	4	100%
4	02	2	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	25%	7	175%	-	0%	1	25%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	9	225%
Indikator Program						**Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD**	**Jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi dibagi jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD Berdasarkan Renja DPRD dikali 100**	**100**	**%**	**11%**	**0%**	**14%**	**38%**	**9%**	**24%**	**9%**	**3%**	**10%**	**3%**	**8%**	**3%**	**9%**	**3%**	**8%**	**7%**	**9%**	**69%**	**6%**	**19%**	**8%**	**12%**	**4%**	**6%**	**105%**	336%
4	**02**	**2**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Jumlah laporan hasil kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi**	**Jumlah laporan hasil kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi**	**251**	**Laporan**	**26**	**10%**	**34**	**14%**	**22**	**9%**	**24**	**10%**	**26**	**10%**	**20**	**8%**	**23**	**9%**	**19**	**8%**	**20**	**8%**	**15**	**6%**	**18**	**7%**	**10**	**4%**	**257**	102%
4	02	2	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahanan Bidang Pemerintahanan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	60	Laporan	6	10%	8	13%	6	10%	5	8%	8	13%	4	7%	5	8%	3	5%	4	7%	4	7%	4	7%	3	5%	60	100%
4	02	2	2.03	0002	Pengawasan Urusanan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	60	Laporan	8	13%	9	15%	4	7%	5	8%	7	12%	4	7%	6	10%	5	8%	5	8%	2	3%	3	5%	2	3%	60	100%
4	02	2	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60	Laporan	5	8%	8	13%	5	8%	5	8%	5	8%	4	7%	6	10%	5	8%	5	8%	6	10%	4	7%	2	3%	60	100%
4	02	2	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	60	Laporan	6	10%	9	15%	5	8%	5	8%	6	10%	6	10%	5	8%	5	8%	5	8%	2	3%	4	7%	2	3%	60	100%
4	02	2	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	100%
4	02	2	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	6	Dokumen	1	17%	-	0%	1	17%	1	17%	-	0%	2	33%	-	0%	1	17%	1	17%	1	17%	3	50%	1	17%	12	200%
4	02	2	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4	Dokumen	-	0%	-	0%	1	25%	3	75%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	4	100%
4	**02**	**2**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah dokumen hasil kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi**	**Jumlah dokumen hasil kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi**	**7**	**Dokumen**	**2**	**29%**	**-**	**0%**	**1**	**14%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**1**	**14%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**2**	**29%**	**1**	**14%**	**7**	100%
4	02	2	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	4	Dokumen	2	50%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	25%	1	25%	4	100%
4	02	2	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	Dokumen	-	0%	-	0%	1	33%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	33%	-	0%	-	0%	1	33%	-	0%	3	100%
4	**02**	**2**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Jumlah laporan hasil kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi**	**Jumlah laporan hasil kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi**	**2**	**Laporan**	**-**	**0%**	**2**	**100%**	**1**	**50%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**4**	**200%**	**1**	**50%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**8**	400%
4	02	2	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2	Laporan	-	0%	2	100%	1	50%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	4	200%	1	50%	-	0%	-	0%	8	400%
Indikator Program						**Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Nilai kualitas hasil survei indeks kepuasan Anggota DPRD**	**90**	**Nilai**																									**90**	98%
4	**02**	**2**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Jumlah dokumen hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Jumlah dokumen hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**292**	**Dokumen**	**24**	**8%**	**27**	**9%**	**25**	**9%**	**23**	**8%**	**24**	**8%**	**24**	**8%**	**25**	**9%**	**26**	**9%**	**25**	**9%**	**24**	**8%**	**26**	**9%**	**26**	**9%**	**305**	104%
4	02	2	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	Dokumen	1	17%	-	0%	-	0%	1	17%	-	0%	1	17%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	17%	4	67%
4	02	2	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	Orang	6	86%	6	86%	6	86%	6	86%	6	86%	6	86%	6	86%	6	86%	6	86%	6	86%	6	86%	6	86%	6	86%
4	02	2	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	24	Dokumen	2	8%	6	25%	4	17%	1	4%	3	13%	2	8%	3	13%	5	21%	3	13%	1	4%	1	4%	2	8%	33	138%
4	02	2	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	100%	-	0%	1	100%
4	02	2	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi DPRD	261	Dokumen	21	8%	21	8%	21	8%	21	8%	21	8%	21	8%	22	8%	21	8%	22	8%	23	9%	24	9%	23	9%	261	100%
4	**02**	**2**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas DPRD**	**Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas DPRD**	**128**	**Dokumen**	**6**	**5%**	**11**	**9%**	**12**	**9%**	**14**	**11%**	**12**	**9%**	**11**	**9%**	**9**	**7%**	**8**	**6%**	**8**	**6%**	**10**	**8%**	**9**	**7%**	**7**	**5%**	**117**	91%
4	02	2	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	Dokumen	-	0%	-	0%	4	33%	4	33%	4	33%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	12	100%
4	02	2	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	6	Laporan	-	0%	2	33%	1	17%	1	17%	-	0%	2	33%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	6	100%
4	02	2	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24	Dokumen	-	0%	1	4%	1	4%	2	8%	1	4%	1	4%	1	4%	1	4%	1	4%	2	8%	1	4%	1	4%	13	54%
4	02	2	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	86	Dokumen	6	7%	8	9%	6	7%	7	8%	7	8%	8	9%	8	9%	7	8%	7	8%	8	9%	8	9%	6	7%	86	100%

LAMPIRAN V

Laporan Realisasi Anggaran 2025

PEMERINTAHAN KAB. GRESIK
SEKRETARIAT DEWAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	**BELANJA DAERAH**	**100.067.769.956,77**	**83.193.711.379,63**	**83,14**	**84.074.570.764,36**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**96.523.681.770,77**	**80.189.367.841,63**	**83,08**	**82.550.372.814,36**
5.1.01	Belanja Pegawai	38.682.508.466,77	37.983.140.503,63	98,19	35.676.678.960,05
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.059.245.000,00	2.824.061.240,00	92,31	2.374.632.115,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.066.805.114,07	1.949.069.649,00	94,30	1.736.033.913,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.792.198.074,00	1.752.007.983,00	97,76	1.707.201.513,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	274.607.040,07	197.061.666,00	71,76	28.832.400,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	219.383.479,74	197.580.155,00	90,06	177.655.048,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	180.418.233,74	175.463.755,00	97,25	173.618.512,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	38.965.246,00	22.116.400,00	56,76	4.036.536,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	106.470.000,00	101.430.000,00	95,27	106.470.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	106.470.000,00	101.430.000,00	95,27	106.470.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	53.031.600,00	52.380.000,00	98,77	50.220.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	45.641.600,00	45.360.000,00	99,38	50.220.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.390.000,00	7.020.000,00	94,99	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	68.867.766,00	63.539.166,00	92,26	48.345.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	54.605.000,00	53.865.000,00	98,64	46.680.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	14.262.766,00	9.674.166,00	67,83	1.665.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	121.110.380,00	107.640.260,00	88,88	94.435.680,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	94.508.100,00	92.625.180,00	98,01	91.828.560,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	26.602.280,00	15.015.080,00	56,44	2.607.120,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	199.172.040,80	184.930.252,00	92,85	4.031.781,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	199.172.040,80	184.930.252,00	92,85	4.031.781,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	32.781,02	27.345,00	83,42	24.407,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.489,02	23.653,00	96,59	23.751,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8.292,00	3.692,00	44,52	656,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	199.339.737,07	151.228.647,00	75,86	143.174.929,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	185.571.005,55	141.758.043,00	76,39	141.947.057,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	13.768.731,52	9.470.604,00	68,78	1.227.872,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.960.332,28	4.058.943,00	81,83	3.560.321,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.301.275,38	3.600.067,00	83,70	3.498.809,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	659.056,90	458.876,00	69,63	61.512,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.880.996,82	12.176.823,00	81,83	10.681.036,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.903.826,13	10.800.259,00	83,70	10.496.508,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.977.170,69	1.376.564,00	69,62	184.528,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	5.190.772,20	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	3.949.075,20	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.241.697,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.468.935.466,77	2.396.956.444,63	97,08	2.170.912.737,05

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.076.172.034,53	1.046.032.680,95	97,20	919.531.231,26
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.067.178.798,70	1.037.132.771,61	97,18	919.531.231,26
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	8.993.235,83	8.899.909,34	98,96	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	12.695.248,16	7.890.892,62	62,16	8.320.702,92
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	12.695.248,16	7.890.892,62	62,16	8.320.702,92
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.380.068.184,08	1.343.032.871,06	97,32	1.243.060.802,87
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.380.068.184,08	1.343.032.871,06	97,32	1.243.060.802,87
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.761.208.000,00	32.369.002.819,00	98,80	30.777.494.108,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	100,00	1.111.845.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	100,00	1.111.845.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	126.241.500,00	125.769.000,00	99,63	146.715.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	126.241.500,00	125.769.000,00	99,63	146.715.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	159.106.740,00	158.889.480,00	99,86	159.975.780,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	159.106.740,00	158.889.480,00	99,86	159.975.780,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00	100,00	95.266.500,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00	100,00	95.266.500,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	100,00	1.612.175.250,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	100,00	1.612.175.250,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	131.726.700,00	131.726.700,00	100,00	111.721.050,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	131.726.700,00	131.726.700,00	100,00	111.721.050,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.625.700,00	16.625.700,00	100,00	14.829.150,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.625.700,00	16.625.700,00	100,00	14.829.150,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	100,00	8.775.900.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	100,00	8.775.900.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	100,00	1.470.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	100,00	1.470.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	193.935,00	191.131,00	98,55	383.547.504,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	193.935,00	191.131,00	98,55	383.547.504,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	703,40	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	703,40	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	12.159.262.721,60	11.772.475.808,00	96,82	10.731.483.874,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	483.165.825,60	97.907.040,00	20,26	98.338.290,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.674.224,00	2.292.192,00	85,71	2.286.396,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	8.022.672,00	6.876.576,00	85,71	6.859.188,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	11.665.400.000,00	11.665.400.000,00	100,00	10.624.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.312.880.000,00	6.312.880.000,00	100,00	5.721.145.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.312.880.000,00	6.312.880.000,00	100,00	5.721.145.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	4.725.000,00	0,00	0,00	442.890.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	4.725.000,00	0,00	0,00	442.890.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	353.640.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	353.640.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	353.640.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.841.173.304,00	42.206.227.338,00	72,97	46.873.693.854,31
5.1.02.01	Belanja Barang	11.472.806.348,00	9.034.607.690,00	78,75	6.504.726.830,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.472.806.348,00	9.034.607.690,00	78,75	6.503.976.830,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	67.346.000,00	53.743.400,00	79,80	53.975.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.533.625,00	2.760.000,00	78,11	2.530.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	195.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	18.574.356,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	510.000.000,00	504.000.002,00	98,82	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.853.660.300,00	1.463.946.527,00	78,98	957.363.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	106.182.800,00	98.902.859,00	93,14	63.154.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.730.109.213,00	2.887.956.994,00	77,42	2.094.066.239,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.830.000,00	1.500.000,00	81,97	500.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	123.922.819,00	86.924.100,00	70,14	81.807.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	38.326.712,00	34.760.520,00	90,70	42.447.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	197.650.000,00	190.250.005,00	96,26	91.900.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	97.984.000,00	52.769.400,00	53,86	18.180.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	111.812.250,00	81.795.800,00	73,15	129.274.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.000.000,00	4.440.000,00	88,80	270.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	75.674.375,00	55.526.500,00	73,38	48.714.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.923.622.079,00	2.931.264.983,00	74,71	2.256.675.335,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	122.460.850,00	83.938.600,00	68,54	73.321.500,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	571.030.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	300.000.000,00	299.866.500,00	99,96	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	100.000.000,00	99.955.500,00	99,96	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	3.691.325,00	850.000,00	23,03	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	100.000.000,00	99.456.000,00	99,46	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00	750.000,00
5.1.02.01.04.0132	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	750.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	20.887.850.401,00	13.985.586.115,00	66,96	10.060.360.185,07
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.616.683.906,00	10.870.941.201,00	74,37	7.262.164.949,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.684.304.800,00	4.397.600.000,00	65,79	1.833.800.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.300.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.557.000.000,00	1.338.000.000,00	85,93	1.520.000.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	33.097.506,00	33.000.000,00	99,71	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	252.000.000,00	240.000.000,00	95,24	252.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	129.000.000,00	126.593.040,00	98,13	149.675.600,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	406.560.000,00	377.630.000,00	92,88	375.770.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	168.000.000,00	168.000.000,00	100,00	164.500.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	53.000.000,00	3.000.000,00	5,66	0,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.212.025.000,00	3.249.473.300,00	77,15	2.059.875.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	30.817.500,00	27.765.851,00	90,10	27.891.727,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	900.000,00	678.000,00	75,33	678.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	391.906.500,00	364.064.010,00	92,90	329.605.414,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	317.292.000,00	310.184.000,00	97,76	300.658.608,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	101.080.000,00	27.246.500,00	26,96	21.792.600,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	203.400.600,00	173.655.000,00	85,38	141.990.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	75.000.000,00	34.051.500,00	45,40	33.578.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.312.000,00	10.710.144,00	86,99	11.575.140,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.472.000,00	4.760.064,00	86,99	5.250.168,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.840.000,00	5.950.080,00	86,99	6.324.972,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.390.553.995,00	1.005.785.560,00	42,07	612.969.487,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	55.550.530,00	1.700.000,00	3,06	4.105.220,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	144.864.465,00	54.500.340,00	37,62	118.981.017,00
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.784.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	723.502.500,00	230.940.640,00	31,92	191.327.500,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	764.219.500,00	329.780.700,00	43,15	135.443.250,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	699.633.000,00	388.863.880,00	55,58	163.112.500,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	685.410.000,00	304.180.000,00	44,38	123.283.950,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	685.410.000,00	304.180.000,00	44,38	123.283.950,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	41.702.400,00	39.472.710,00	94,65	73.821.660,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	26.078.400,00	24.658.650,00	94,56	43.392.120,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	15.624.000,00	14.814.060,00	94,82	19.304.010,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	11.125.530,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	660.635.600,00	601.496.500,00	91,05	755.544.999,07
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	45.600.000,00	44.400.000,00	97,37	162.728.999,07
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	43.000.000,00	0,00	0,00	41.736.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	498.547.000,00	487.000.000,00	97,68	551.080.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	73.488.600,00	70.096.500,00	95,38	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.477.500.000,00	1.153.000.000,00	46,54	1.221.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.477.500.000,00	1.153.000.000,00	46,54	1.221.000.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	3.052.500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	3.052.500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.166.810.584,00	961.006.795,00	82,36	1.140.894.478,24
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	722.520.500,00	524.895.862,00	72,65	509.866.777,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	5.069.100,00	5.030.312,00	99,23	3.169.050,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	154.035.000,00	105.549.318,00	68,52	354.835.246,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	277.050.000,00	275.978.642,00	99,61	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.300.000,00	2.458.000,00	33,67	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	8.730.400,00	8.652.500,00	99,11	13.203.450,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	104.200.000,00	40.500.000,00	38,87	30.150.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	73.200.000,00	71.449.590,00	97,61	82.256.550,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.839.300,00	2.497.500,00	18,05	8.202.481,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	13.616.400,00	130.000,00	0,95	0,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	10.990.800,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.600.000,00	6.600.000,00	45,21	6.720.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	13.800.000,00	6.050.000,00	43,84	2.330.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	26.089.500,00	0,00	0,00	9.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	437.975.984,00	430.875.933,00	98,38	617.393.201,24
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	437.975.984,00	430.875.933,00	98,38	617.393.201,24
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.314.100,00	5.235.000,00	82,91	13.634.500,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.564.100,00	1.885.000,00	73,52	6.296.000,00
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	3.750.000,00	3.350.000,00	89,33	7.338.500,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.794.755.971,00	11.691.026.738,00	74,02	25.930.412.361,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.794.755.971,00	11.691.026.738,00	74,02	25.930.412.361,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.023.189.781,00	10.737.934.656,00	76,57	23.978.592.481,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	15.360.000,00	15.360.000,00	100,00	23.680.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	981.718.750,00	644.813.782,00	65,68	348.349.880,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	774.487.440,00	292.918.300,00	37,82	1.579.790.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.518.950.000,00	6.534.000.000,00	76,70	3.237.300.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.518.950.000,00	6.534.000.000,00	76,70	3.237.300.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	8.518.950.000,00	6.534.000.000,00	76,70	3.237.300.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**96.523.681.770,77**	**80.189.367.841,63**	**83,08**	**82.550.372.814,36**
5.2	**BELANJA MODAL**	**3.544.088.186,00**	**3.004.343.538,00**	**84,77**	**1.524.197.950,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.544.088.186,00	3.004.343.538,00	84,77	1.524.197.950,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.630.861.500,00	1.518.932.530,00	93,14	124.250.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	587.400.000,00	537.240.000,00	91,46	106.250.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	587.400.000,00	537.240.000,00	91,46	106.250.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.043.461.500,00	981.692.530,00	94,08	18.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	41.278.100,00	32.500.001,00	78,73	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.002.183.400,00	949.192.529,00	94,71	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	757.807.406,00	428.911.008,00	56,60	1.143.362.950,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	737.268.776,00	408.961.005,00	55,47	1.143.362.950,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	1.143.362.950,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	737.268.776,00	408.961.005,00	55,47	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	20.538.630,00	19.950.003,00	97,13	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	20.538.630,00	19.950.003,00	97,13	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	554.768.640,00	477.000.000,00	85,98	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	554.768.640,00	477.000.000,00	85,98	0,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	554.768.640,00	477.000.000,00	85,98	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	600.650.640,00	579.500.000,00	96,48	256.585.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	555.815.520,00	536.000.000,00	96,43	93.500.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	555.815.520,00	536.000.000,00	96,43	93.500.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	44.835.120,00	43.500.000,00	97,02	163.085.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	44.835.120,00	43.500.000,00	97,02	69.200.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	93.885.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**3.544.088.186,00**	**3.004.343.538,00**	**84,77**	**1.524.197.950,00**
	JUMLAH BELANJA	**100.067.769.956,77**	**83.193.711.379,63**	**83,14**	**84.074.570.764,36**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
	SURPLUS/DEFISIT	**(100.067.769.956,77)**	**(83.193.711.379,63)**	**83,14**	**(84.074.570.764,36)**

Kab. Gresik, 5 Januari 2026

KEPALA SEKRETARIAT DEWAN

Ir. MOKH. NAJIKH, M.M.

NIP.196804121992031011

LAMPIRAN VI

Cascading Sekretariat DPRD

CASCADING

VISI

Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat

MISI

Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat

TUJUAN

Terwujudnya Sinergitas Antara Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indeks Pelayanan Publik

SASARAN

Meningkatnya kualitas pelayanan atas dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD

Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD

Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi keseketariatan dan keuangan

PROGRAM

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Ketepatan Penetapan Ranperda Tahun N	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase Dukungan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keseketariatan
	Ketepatan Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Nisa Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

KEGIATAN

Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Administrasi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pembahasan Kerjasama Daerah	Peningkatan Kapasitas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD										
Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	Jumlah dokumen layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi	Jumlah fasilitasi kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembahasan kerjasama daerah yang difasilitasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi tugas DPRD	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Jumlah dokumen hasil penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi

SUB KEGIATAN

| Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Penyelenggaraan Administrasi Kesangpatisan DPRD | Fasilitasi Fraksi DPRD | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa/Kelurahan dan Naskah Akademik | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dibuat bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | Pembahasan KUA dan PPAS | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Pembahasan APBD | Pembahasan APBD Perubahan | Pembahasan Laporan Semester | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Pelaksanaan Reses | Penyusunan Kode Etik DPRD | Pengawasan Kode Etik DPRD | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Penetapan Kerjasama Daerah | Orientasi DPRD | Pendidikan Tugas DPRD | Penyediaan Pakaian dan Tas Aksi | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Penyusunan Program Kerja DPRD | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Penyusunan Laporan Kinerja OPD | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | | | | | | | | | | | | | | | |

LAMPIRAN VII

Laporan Hasil Implementasi SAKIP 2024

12 31

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E- mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK

Gresik, 14 Oktober 2025

Nomor : X.700.04/2304/437.72/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Hasil Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Kepada
Yth. Sekretaris DPRD
Kabupaten Gresik
di-
GRESIK

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P, M.T, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

1239

M.APIP.32

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN ANGGARAN 2024 (POST ANTE) DAN TAHUN ANGGARAN 2025 (ON GOING) PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
INSPEKTORAT
Jl. Dr. WahidinSudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308
E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN ANGGARAN 2024 (*POST-ANTE*) DAN TAHUN ANGGARAN 2025 (*ON-GOING*) PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 700/2301.3/437.72/2025
TANGGAL : 14 Oktober 2025

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2024 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/2078/437.72/2025 Tanggal 22 September 2025.

B. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

C. Tujuan

Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah derah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Rencana Aksi Tahun 2025 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi

(LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	**Sangat Memuaskan** Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	**Memuaskan,** Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	**Sangat Baik,** Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampoai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	**Baik**, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada

	unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	**Cukup (memadai),** Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	**Kurang**, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	**Sangat Kurang**, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

E. Metodologi dan Tehnik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

F. Gambaran Umum

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);,

sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya.

Untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Fasilitasi pengganggaran, pengawasan, kerjasama dan Aspirasi; dan
5. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Struktur kelembagaan atau organisasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik, terdiri dari:

a. Sekretaris DPRD;
b. Bagian Umum, terdiri atas:
   1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
   2. Kelompok Jabatan Fungsional.
b. Bagian Program dan Keuangan, terdiri atas
   1. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri atas
   1. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi, terdiri atas
   1.Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli

Secara lebih jelas, struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

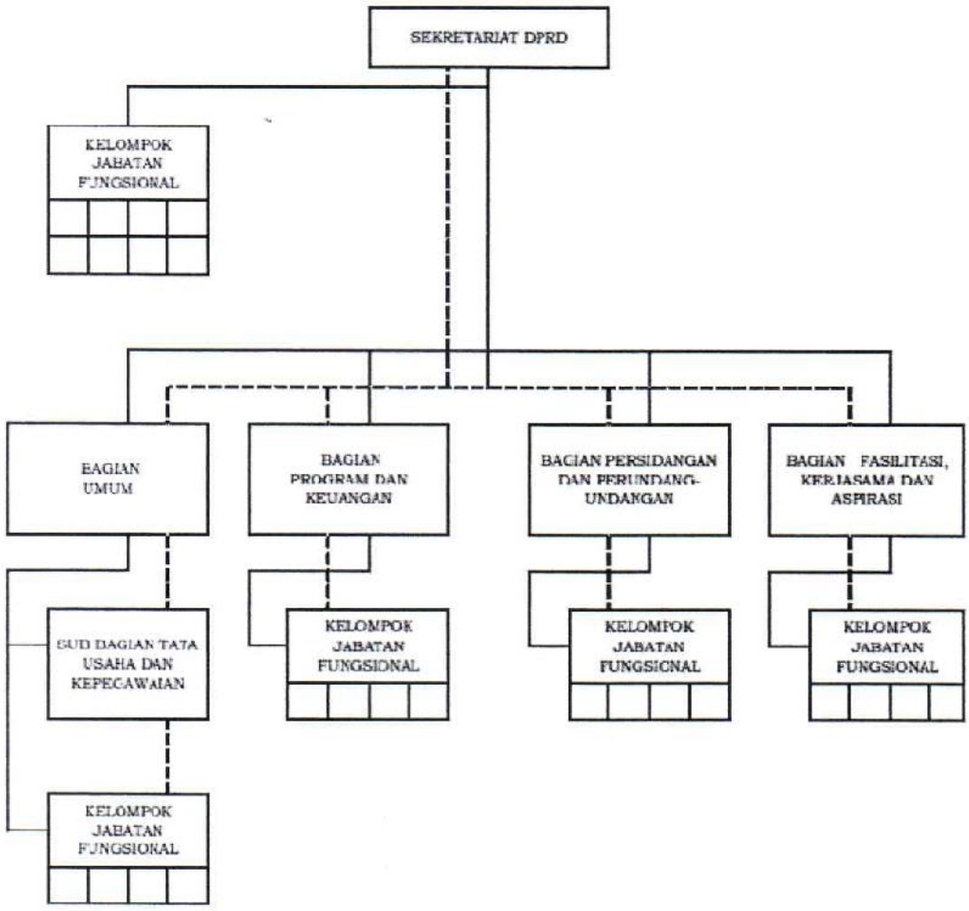

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2025 didukung oleh ASN sebanyak 36 orang dengan rincian sebagai berikut:

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik

berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Mei 2025

No	Uraian	Pendidikan						Jumlah
	Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (I/a)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (I/c)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I (I/d)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur (II/c)	-	-	1	2	-	-	3
	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	3	-	-	-	3
3.	Penata Muda (III/a)	-	-	2	-	7	-	9
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-	-	-	-	9	-	9
	Penata (III/c)	-	-	-	-	-	-	-
	Penata Tingkat I (III/d)	-	-	-	-	5	2	7
4.	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	2	1	3
	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**-**	**-**	**6**	**2**	**23**	**5**	**36**

Anggaran untuk menyelenggarakan program dan kegiatan tahun 2025 adalah sebesar Rp100.067.769.956,77 dan telah direalisasi sebesar Rp. 57.106.350.661,63 atau 57,07 %.

f. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik telah baik dengan kategori **Memuaskan,** namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik menjadi lebih baik dan terarah.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor 050/718/437.44/2024 pada tanggal 5 Agustus

2024.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil evaluasi

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (AKIP) Tahun Anggaran 2024 (Post-Ante) Dan Tahun Anggaran 2025 (On-Going) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik memperoleh nilai sebesar **86,85** dengan kategori **A (Memuaskan).**

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	26,48
b. Pengukuran Kinerja	30%	26,54
c. Pelaporan Kinerja	15%	11,33
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22,50
J u m l a h	**100%**	**86,85**

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan *(subtainability)* implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Evaluasi Perencanaan Kinerja

   Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen :

   1) Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029;
   2) Rencana Kerja Tahun 2025;
   3) Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 dan PAPBD Tahun 2025;
   4) Rencana Aksi Tahun Tahun 2025;
   5) DPA Tahun 2024.

   Hasil evaluasi atas atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja

menunjukkan nilai sebesar **26,48** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **88,27%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan).**

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen sebagai berikut :

1) Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029;
2) Rencana Kerja Tahun 2025;
3) Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, dan PAPBD Tahun 2025 yang telah menyadikan Indikator Tujuan/ Sasaran;
4) Rencana Aksi Tahun 2025;
5) DPA Tahun 2024;

Belum melampirkan DPA Tahun 2025

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **5,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **95,83%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan).**

b. Penilaian Kualitas Renstra

Rencana Kerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, dan PAPBD Tahun 2025 telah diformalkan namun Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 belum diformalkan.

Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029, Renja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu dengan melampirkan screenshot esr menpan e-SAKIP.

Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 belum memenuhi kriteria SMART dikarenakan Indikator tujuan dengan satuan tidak sesuai, seharusnya menggunakan satuan indeks.

Sasaran telah telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.

Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) Sasaran telah memenuhi kriteria SMART.

Indikator Kinerja Tujuan belum menggambarkan kondisi Tujuan

yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis) dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 dikarenakan indikator kinerja tujuan berubah.

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.

Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading Kinerja).

Sasaran dalam renstra telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria SMART dan tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis. Setiap dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading kinerja).

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar **7,88** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **87,50%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan).**

c. Penilaian Implementasi

Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.

Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.

Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.

Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja.

Target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

Setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncakanan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Dokumen Renstra telah direviu secara berkala.

Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar **12,86** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**, atau **85,71%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan).**

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan pengukuran kinerja, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment*, *refocusing* organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,54** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **88,45%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan).**

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal dan terdapat cara mengukur indikator kinerja, namun IKU 2025 belum terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja.

Mekanisme pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan melampirkan Surat Edaran Bupati Nomor 067/301/437.31/2022 perihal Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja pada tanggal 13 April 2022.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar **3,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **58,33%** dengan kategori peringkat **CC (Cukup).**

b. Kualitas Pengukuran

Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja dengan menyusulkan bukti pendukung evaluasi renja triwulan IV namun isi notulennya hanya membahas SIPD.

Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.

Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.

Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala triwulan dengan menyusulkan bukti pendukung evaluasi renja triwulan IV namun isi notulennya hanya membahas SIPD.

Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang.

Pengukuran capaian kinerja dan Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dengan melampirkan *screenshot* siakri.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **8,04** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **89,29%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan).**

c. Implemetansi Pengukuran

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dengan melampirkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik namun belum melampirkan *screenshot* rekap tunjangan sipantas sebagai bukti pengurangan tunjangan kinerja.

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi, Strategi dalam mencapai kinerja, Kebijakan dalam mencapai kinerja, Aktivitas dalam mencapai kinerja, Anggaran dalam mencapai kinerja.

Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dengan melampirkan perhitungan efisiensi pada LKjIP.

Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dengan melampirkan SKP seluruh Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **15,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA**

(Sangat Memuaskan).

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **11,33** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **80,00**% dengan kategori peringkat **A (Memuaskan).**

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2024 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala, diformalkan, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu, namun belum dilakukan reviu oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar **2,40** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan).**

b. Penyajian Informasi Kinerja

Dokumen LKjIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik telah disusun menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja), Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya namun hanya tahun 2024 saja. LKjIP Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik belum sesuai dengan standar yaitu Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikarenakan Dokumen Laporan Kinerja belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yakni terkait Analisis capaian kinerja dengan Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **2,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **55,56%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **CC (Cukup).**

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab) dengan melampirkan screenshot approval sasaran renstra oleh pimpinan di aplikasi siakri.

Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai dengan melampirkan Rapat Koordinasi terkait Pelaporan Monev IV dan Penatausahaan Keuangan melalui Aplikasi SIPD RI di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.

Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, Informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

Namun Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik belum dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi belum melampirkan SKP perilaku kinerja organisasi dan LKjIP perubayan budaya.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **85,71%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori

peringkat **A (Memuaskan).**

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **22,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **90,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan).**

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik namun hanya melampirkan LHE Inspektorat Kabupaten Tahun 2024.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan).**

b. Kualitas Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan melampirkan sertifikat auditor yang telah mengikuri bimtek SAKIP.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dengan melampirkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) dengan melampirkan *screenshot* aplikasi siakri.

Namun Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik tidak upload dokumen yang sesuai dengan uraian di siakri.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas

kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan).**

c. Pemanfaatan Evaluasi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan terjadi—peningkatan implementasi AKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja tersebut.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **10,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan).**

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakuan tindak lanjut perbaikan diantaranya:

1. Agar melampirkan DPA Tahun 2025 dan DPPA Tahun 2025;
2. Agar melampirkan Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 yang telah diformalkan;
3. Agar mengusulkan kepada BAPPEDA Kabupaten Gresik untuk merubah (Indikator Kinerja) Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 yang tidak sesuai dengan satuan;
4. Agar menyusun IKU dengan definisi operasional yang jelas atas kinerja;
5. Agar melampirkan bukti pendukung evaluasi renja triwulan IV dengan daftar hadir seluruh pegawai, notulen tidak hanya membahas SIPD namun membahas evaluasi renja;
6. Agar menyusun LKjIP sesuai dengan standar yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikarenakan Dokumen Laporan Kinerja belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yakni terkait Analisis capaian kinerja dengan Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

7. Agar melampirkan SKP perilaku kinerja dan menyusun LKjIP dengan perubahan budaya;
8. Agar upload dokumen pada aplikasi siakri sesuai dengan uraian;

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 (*post-ante)* dan Tahun 2025 (*on-going)* dengan perolehan nilai sebesar **86,85** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.

Mengetahui :
INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI,S.P.,M.T.,CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

TIM EVALUASI :

1. J. GANDJUR A. S.Sos. MM.
   NIP. 19700625 199503 1 004
2. DARWIS, SH.
   NIP. 19660519 199501 1 001
3. NURUL IMAMI, SE
   NIP. 19820624 201101 2 007
4. KARINA RAHMAWARDANI, SH.
   NIP. 19941020 201903 2 010
5. HAIDAR ADI MAHENDRA.A.Md.Ak
   NIP. 20000822 202201 1 001

LAMPIRAN VIII

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2024

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. K. H. Wachid Hasyim No. 5, Tlp. (031)3981794, Fax.(031)3984989, Gresik 61114

GRESIK

Gresik, 26 Februari 2026

Nomor : 050 /98/ 437.44 / 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2024

Kepada
Sdr. Inspektorat Kabupaten Gresik
di -
GRESIK

Menindaklanjuti surat Inspektorat Kabupaten Gresik Nomor X.700.04/2302/437.72/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Hasil Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi dimaksud sebagai berikut:

1. **Agar melampirkan DPA Tahun 2025 dan DPPA Tahun 2025.**
   - Telah dilakukan pembenahan dokumen perencanaan dengan melampirkan DPA Tahun 2025 dan DPPA Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja..
   - Link : DPA APBD 2025 dan DPPA PAPBD 2025

2. **Agar melampirkan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 yang telah diformalkan**
   - Sekretariat DPRD telah menyusun dan menetapkan Dokumen Renstra 2025–2029 melalui proses formal sesuai ketentuan yang berlaku dan telah dilaporkan kepada Bappeda Kabupaten Gresik.
   - Link : Renstra 2025-2029

3. **Agar mengusulkan kepada Bappeda Kabupaten Gresik untuk merubah Indikator Kinerja Tujuan dalam Renstra 2025–2029 yang tidak sesuai dengan satuan**
   - Telah dilakukan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Gresik untuk melakukan penyesuaian satuan pada Indikator Kinerja Tujuan yang tidak sesuai, agar sejalan dengan ketentuan teknis penyusunan dokumen Renstra.

- Link : Renstra 2025-2029

4. **Agar menyusun IKU dengan definisi operasional yang jelas atas kinerja**
   - Perangkat daerah telah melakukan reviu dan penyempurnaan terhadap indikator kinerja utama (IKU) agar memiliki definisi operasional yang lebih terukur, relevan, dan mudah dievaluasi dalam laporan kinerja.
   - Link : IKU SETWAN 2026

5. **Agar melampirkan bukti pendukung evaluasi Renja Triwulan IV dengan daftar hadir seluruh pegawai, notulen tidak hanya membahas SIPD namun membahas evaluasi Renja**
   - Telah dilakukan perbaikan pada pelaksanaan evaluasi Renja Triwulan IV dengan melampirkan daftar hadir seluruh pegawai dan notulen rapat yang mencerminkan pembahasan capaian Renja secara menyeluruh, bukan hanya terkait aplikasi SIPD.
   - Link : Rapat Monev Triwulan IV Tahun 2024

6. **Agar menyusun LKjIP sesuai dengan standar yaitu Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja**
   - Penyusunan LKjIP telah disesuaikan dengan pedoman Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, termasuk analisis capaian kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya, serta langkah perbaikan berkelanjutan.
   - Link : LKjIP 2024

7. **Agar melampirkan SKP Perilaku Kinerja dan menyusun LKjIP dengan perubahan budaya**
   - Sekretariat DPRD telah melampirkan dokumen SKP dan penilaian perilaku kinerja sebagai bagian dari penguatan budaya kerja berorientasi hasil dan penyusunan LKjIP yang mencerminkan nilai perubahan budaya.
   - Link : SKP Tahun 2024

8. **Agar upload dokumen pada aplikasi SIAKRI sesuai dengan uraian**
   - Dokumen hasil perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja telah diunggah ke dalam aplikasi SIAKRI secara lengkap dan sesuai dengan format yang ditetapkan.
   - Link : SS Kelengkapan dokumen SIAKRI

Demikian surat tindak lanjut ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Atas perhatian dan arahannya, kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
SEKRETARIAT DPRD

Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19680412 199203 1 011